

---

# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

---



KOTA BEKASI



---

**BADAN  
KESATUAN  
BANGSA DAN  
POLITIK KOTA  
BEKASI**

---

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Akhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 dapat diselesaikan penyusunannya. Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Akhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Akhir Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan dan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025, dimana target dan indikator sasaran yang telah disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi dan menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja yang harus dicapai di akhir tahun 2025.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman semua aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama. Kami menyadari, tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, pendapat, dan kritik demi penyempurnaan Renja untuk masa yang akan datang. Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan Renja ini.

Bekasi,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BEKASI

  
**NESAN SUJANA/S.T., M.T. CGCAE**  
Pembina Tk. I / (IV.b)  
NIP. 19740708 200212 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....i

DAFTAR ISI .....ii

DAFTAR TABEL .....iii

DAFTAR GAMBAR ..... iv

**BAB I ..... 1**

**PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 LATAR BELAKANG ..... 1

1.2 LANDASAN HUKUM ..... 5

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ..... 8

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ..... 9

**BAB II ..... 10**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU 10**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2023 dan  
Capaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi ..... 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi .....29

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....36

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....38

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .....50

**BAB III .....52**

**TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI .....52**

3.1Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....52

3.2Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol .....57

3.3Program dan Kegiatan .....58

**BAB IV .....72**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2025 .....72**

**BAB V .....83**

**PENUTUP .....83**

A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja .....83

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....83

C. Rencana Tindak Lanjut .....84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Perubahan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Rencana Strategis Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2018-2023) ..... 21

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi ..... 32

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2018-2023 (Rencana Strategis Perubahan Bakesbangpol Tahun 2018-2023)..... 33

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2024-2026 (Rencana Strategis Teknokratik Bakesbangpol Tahun 2024-2026) ..... 34

Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ..... 40

Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Bekasi ..... 50

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renja PD dengan RKPD ..... 4

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renja PD dengan Renja PD Prov ..... 5

Gambar 2. 1 Struktur Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi  
(Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021) ..... 32

Gambar 2. 2 Alur Rancangan Awal RKPD dan Renja PD ..... 39

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara erubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunanm Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pemerintah daerah wajib untuk menyusun rencana strategis teknokratis daerah sebagai pedoman untuk mengisi berakhirnya rencana strategis kepala daerah terpilih. Dengan berakhirnya periode masa kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih untuk tahun 2018-2023, maka berakhir pula Renstra Kesbangpol Kota Bekasi yang merujuk kepada Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Oleh karena itu Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah menyusun Renstra Teknokratik pada tahun 2024-2026 sebagai bentuk antisipasi kekosongan arah pembangunan.

Renstra Teknokratik perlu diterjemahkan ke dalam Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kota Bekasi untuk tahun anggaran 2025. Dokumen Renja ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam melakukan perencanaan dan keuangan pembangunan. Renja ini berfungsi sebagai panduan (*Guidance*) tahunan di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersifat urusan (langsung) pada Badan Kesbangpol.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja untuk tahun kedua periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2025, Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi dalam menyusun Renja sangat memperhatikan program prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026 yang termuat ke dalam 5 (lima) tujuan, diantaranya :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel;
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan;
3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
4. Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman;
5. Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota.

Dari ke-5 tujuan tersebut, jika dilihat berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol sangat terkait erat dengan tujuan ke-1 dan ke-4, kemudian dijabarkan ke dalam bentuk tujuan-tujuan pembangunan daerah. Tujuan yang dimaksud adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang**

**Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel” dan “Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman”.**

Berdasarkan tujuan dari arah kebijakan pembangunan tersebut, Rencana Kerja (Renja) Akhir Badan Kesbangpol disusun. Rencana Kerja (Renja) Akhir Badan Kesbangpol merupakan salah satu alat di dalam menjalankan roda pemerintahan pada Badan Kesbangpol. Renja ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam melakukan perencanaan dan keuangan pembangunan. Renja ini berfungsi sebagai panduan (*Guidance*) tahunan di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersifat urusan (langsung) pada Badan Kesbangpol.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan di dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Kesbangpol sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi juga mengacu kepada perundang-undangan tersebut.

Dalam melakukan penyusunan Renja, Badan Kesbangpol selalu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang memiliki kompetensi di dalam mendukung penyusunan renja ini. Proses penyusunan ini Renja ini dimulai dengan mengajukan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah pada tahun 2025 kepada Bappelitbangda Kota Bekasi sebagai operator utama perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang diajukan oleh Badan Kesbangpol merujuk kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026, Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol 2024-2026, usulan-usulan kecamatan yang diaring melalui Musrenbang tingkat kecamatan serta masukan dari Forum Perencanaan Tingkat Perangkat Daerah.

Forum Perencanaan Tingkat Perangkat Daerah merupakan forum pembahasan perencanaan Badan Kesbangpol tertinggi. Peserta forum ini terdiri dari unit kerja yang ada di lingkungan Badan Kesbangpol, organisasi/komunitas yang bekerjasama dengan Badan Kesbangpol hingga

kecamatan yang memiliki keselarasan kegiatan dengan Badan Kesbangpol. Forum ini kemudian melakukan finalisasi penyusunan program dan kegiatan prioritas tingkat Perangkat Daerah. Hasil dari forum ini menjadi usulan program dan kegiatan Badan Kesbangpol.

Usulan program dan kegiatan Tahun 2025 Badan Kesbangpol tersebut kemudian disatukan dengan usulan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah lain dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi untuk dibahas ke dalam Pra Musrenbang Kota Bekasi. Dalam forum ini terjadi proses telaah analitik mengenai daftar program dan kegiatan RKPD untuk disempurnakan. RKPD yang telah disempurnakan tersebut kemudian dibawa ke dalam forum Musrenbang tingkat Kota Bekasi untuk disahkan dalam bentuk penandatanganan berita acara Musrenbang. Hasil dari Musrenbang tingkat Kota ini merupakan finalisasi program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah.

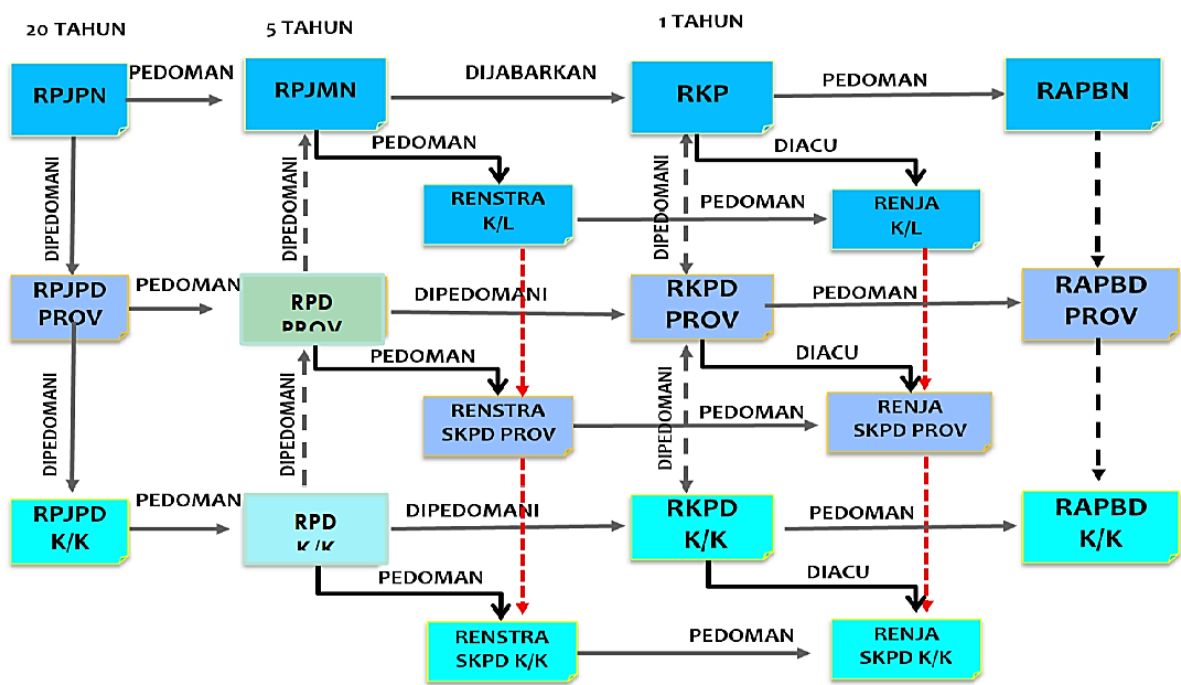
Gambar 1. 1 Keterkaitan Renja PD dengan RKPD



Pada Renja ini juga akan dijelaskan terkait prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang memiliki keterkaitan dengan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan politik. Salah satu prioritas pembangunan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Jawa Barat adalah pengutan fungsi deteksi dini di wilayah Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat melalui sinkronisasi Sistem Informasi Situasi dan Kondisi Daerah (SIKONDA. Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Kota

Bekasi dapat melakukan peningkatan kapasitas fungsi deteksi dini di Kota Bekasi melalui kerjasama deteksi dini dengan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renja PD dengan Renja PD Prov



Langkah yang dapat dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi terkait peningkatan kapasitas deteksi dini di wilayah Kota Bekasi adalah dengan melakukan kolaborasi kinerja fisik dengan Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi kegiatan dapat dilakukan dengan pembagian data pemantauan situasi kondisi daerah (SIKONDA) dan pemetaan wilayah rawan konflik.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 didasarkan kepada :

- Landasan Ideologi Pancasila;
  - Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945;
- Landasan operasional, terdiri dari :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-444 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
  27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;
  28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;

29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi;
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
33. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
34. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026; dan
35. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud dari penyusunan Renja adalah untuk memberikan panduan dan arah bagi aparatur Badan Kesbangpol dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Badan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Renja Badan Kesbangpol ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh aparatur Badan Kesbangpol. Renja ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan yang dijalankan Badan Kesbangpol sejalan dan searah dengan Rencana Pembangunan Daerah atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- b. Tujuan penyusunan Renja Tahun 2025 :  
Adapun tujuan dari Renja Badan Kesbangpol, adalah:
  1. Merumuskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol dalam jangka tahun 2025 agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien;

2. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pelaksanaan kegiatan yang hendak dicapai dalam tahun 2025;
3. Menetapkan pedoman (input, output dan outcome) dalam melaksanakan kegiatan tahunan Badan Kesbangpol;
4. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir dari organisasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. BAB I adalah PENDAHULUAN. Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
2. BAB II adalah EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KESBANGPOL TAHUN 202. Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program serta kegiatan masyarakat;
3. BAB III adalah TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional terkait bidang kerja Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah.
4. BAB IV adalah RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V adalah PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tahun 2018-2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Badan Kesbangpol untuk melaksanakan pembangunan di Kota Bekasi.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bekasi pada dasarnya bermuara dari visi yang telah digariskan oleh Wali Kota terpilih. Visi Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan menjadi landasan konsepsional di dalam melakukan perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 4 (empat) indikator sasaran. Indikator tersebut antara lain:

1. Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
2. Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan;
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik;
4. Persentase Ormas yang Berpreranan Aktif dalam Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan dalam proses perumusan Renja Badan Kesbangpol adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara menyeluruh yang dikaitkan dengan empat komponen indikator sasaran tersebut. Kondisi daerah Kota Bekasi terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari indikator sasaran sebagai berikut :

### 1. Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Salah satu misi pembangunan Walikota yang dibebankan ke dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi ke-1, yaitu **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik”**. Dalam mendukung misi tersebut Badan Kesbangpol Kota Bekasi menetapkan indikator sasaran Nilai AKIP Bakesbangpol dengan menargetkan perbaikan serta peningkatan kualitas mutu pelayanan perangkat daerah Bakesbangpol. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator sasaran kinerja tersebut adalah dengan **“Mengoptimalkan peningkatan Adminitrasi, SDM, Sarana dan Prasana, serta pelaporan kinerja”**. Pada tahun 2023, indikator ini menetapkan target **“BB”** dengan kategori *“Sangat Baik”* sebagai bentuk peningkatan Akuntabilitas pelayanan pada Bakesbangol Kota Bekasi.

### 2. Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan

Salah satu misi pembangunan Walikota yang dibebankan ke dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi ke-5, yaitu **“Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota yang Aman dan Cerdas, Serta Lingkungan Hidup yang Nyaman”**. Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam indikator sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi sebagaimana yang tertera di dalam sub judul. Salah satu upaya untuk menekan kasus Perselisihan SARA adalah dengan menurunkan jumlah gangguan Kantrantibmas dan Pelanggaran Ketertiban di Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator sasaran tersebut adalah dengan **“Peningkatan kesatuan bangsa dengan pemantapan ideologi nasional melalui Pembauran Kebangsaan, Peningkatan Kewaspadaan Nasional dengan pencegahan serta memfasilitasi penanganan Konflik Sosial dan Pemantapan Kerukunan Masyarakat dalam menjaga ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi”**. Pada tahun 2023, indikator ini menetapkan target *“Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan”* yang terjadi di Kota Bekasi. Indikator ini menargetkan bahwa kejadian permasalahan perselisihan SARA yang terjadi di Kota Bekasi harus diselesaikan 100%.

### 3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai juga perlu dikembangkan dari sisi peningkatan kondusifitas di

masyarakat. Terkait hal tersebut Pendidikan Politik ini sangat diperlukan demi terciptanya iklim masyarakat yang kondusif, santun dan beretika dalam mendukung stabilitas dan keberlangsungan roda pemerintahan dan kehidupan sosial di Kota Bekasi. Dengan adanya Pendidikan Politik, masyarakat Kota Bekasi akan mengalami peningkatan kesadaran dan kesantunan di dalam berpolitik. Kesadaran dan kesantunan di dalam berpolitik dari masyarakat akan berimplikasi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan warga terkait segala tahapan kebijakan dan keputusan dalam ranah politik. Indikator ini menargetkan situasi masyarakat Kota Bekasi yang aktif dalam memberikan aspirasi serta berdemokrasi melalui penyampaian pendapat baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada pemerintah sebagai bentuk partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjadi di Kota Bekasi.

#### **4. Persentase Ormas yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah**

Kerukunan masyarakat yang terjalin baik dan kondusif sampai saat ini diimbangi dengan pembangunan daerah dalam seluruh aspek kehidupan dari berbagai bidang tidak terlepas dari peranan suatu kelompok/perkumpulan suatu organisasi yang terdiri dari berbagai latar belakang. Kota Bekasi sebagai daerah dengan perkembangan yang cepat sangat membutuhkan pendampingan peran serta dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu bentuk upaya dalam mencapai indikator sasaran tersebut melalui fasilitasi peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah melalui berbagai bidang diantaranya Pendidikan, Keagamaan, Kebudayaan, Sosial Kemasyarakatan, Sosial Kontrol dan lain hal. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang setiap tahun bertambah banyak dapat dijadikan dorongan percepatan pembangunan daerah disisi lain pemerintah memberikan pembinaan untuk menghindarkan gesekan antar kelompok yang bermotif demi mencapai tujuan atau kepentingan masing-masing kelompok dan tidak untuk masyarakat luas.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Badan Kesbangpol Kota Bekasi ditunjang dengan Belanja Langsung Penunjang Urusan dan Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah, dengan ruang lingkup kinerjanya sebagai berikut :

## 1. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

Belanja Langsung Penunjang Urusan Badan Kesbangpol Kota Bekasi dianggarkan sebesar Rp. 10.079.397.613 dan sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp 9.078.207.469 (90,07%) dan untuk realisasi kinerja mencapai 100%. Faktor pendukung pencapaian program/kegiatan dari Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) antara lain :

- a. Adanya komitmen kinerja dari aparatur Badan Kesbangpol;
- b. Tersedia pagu anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah ditargetkan;
- c. Adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol tanpa mengurangi capaian realisasi kinerja.

Adapun perincian Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sebagian besar realisasi kegiatan dan Sub Kegiatan pada program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

## **2. Belanja Langsung Urusan (BLU)**

Sampai dengan bulan Desember 2023, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terdapat perubahan pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang berimplikasi kepada perubahan target capaian indikator pada setiap kegiatan dan sub kegiatan Belanja Langsung Urusan Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang dianggarkan sebesar Rp. 75.310.606.860,- terealisasi sebesar Rp. 68.784.692.449,- (91,33%) dan untuk realisasi kinerja mencapai 98,44%. Adapun rincian Belanja Langsung Urusan (BLU) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 90,90%. Faktor-faktor pendukung pencapaian Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, meliputi komitmen yang kuat dari pimpinan di berbagai tingkatan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, yang berperan penting dalam mendorong pelaksanaan program; keterlibatan aktif dari berbagai stakeholder, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah/sector swasta, yang menciptakan sinergi positif; Program ini juga melibatkan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi yang intensif, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini mencakup pelatihan, seminar, dan diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda, untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan

kesadaran berbangsa. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif, rasa persatuan, dan toleransi, yang merupakan aspek penting dalam menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa Indonesia; ketersediaan anggaran yang cukup dan tepat waktu untuk mendukung semua kegiatan; penerapan kreativitas dan inovasi dalam metode pelaksanaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital; serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dan relevan, yang memberikan landasan yang kuat bagi keberhasilan program/kegiatan. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

### **III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 91,05%. Faktor-faktor pendukung pencapaian Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, mencakup komitmen yang kuat dan konsisten dari pimpinan di berbagai tingkatan, baik di lembaga pemerintah maupun partai politik, yang berperan krusial dalam mendorong pelaksanaan program; keterlibatan aktif dan kolaboratif dari berbagai stakeholder, termasuk partai politik, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, yang menciptakan sinergi positif; keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam bidang pendidikan politik, etika, dan budaya politik; sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi tantangan serta melakukan perbaikan yang diperlukan; kegiatan

sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik; ketersediaan anggaran yang cukup dan tepat waktu untuk mendukung semua kegiatan; penerapan kreativitas dan inovasi dalam metode pelaksanaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital; serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dan relevan, yang memberikan landasan yang kuat bagi keberhasilan program secara keseluruhan. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
  - Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

#### **IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 mencapai realisasi kinerja sebesar 97,10% dan realisasi anggaran sebesar 94,44%. Faktor-faktor pendukung pencapaian Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, mencakup komitmen yang kuat dan konsisten dari pimpinan di berbagai tingkatan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, yang berperan krusial dalam mendorong pelaksanaan program;

keterlibatan aktif dan kolaboratif dari berbagai stakeholder, termasuk organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan lembaga terkait, yang menciptakan sinergi positif; sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi tantangan serta melakukan perbaikan yang diperlukan; kegiatan sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan; tersedianya infrastruktur yang memadai, baik fisik maupun non-fisik, yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; ketersediaan anggaran yang cukup dan tepat waktu untuk mendukung semua kegiatan; penerapan kreativitas dan inovasi dalam metode pelaksanaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk pendaftaran dan pengawasan; serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dan relevan, yang memberikan landasan yang kuat bagi keberhasilan program secara keseluruhan. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

#### **V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 82,64%. Faktor-faktor pendukung pencapaian Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, mencakup komitmen yang kuat dan konsisten dari pimpinan di berbagai tingkatan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, yang berperan krusial dalam mendorong pelaksanaan program; keterlibatan aktif dan kolaboratif dari berbagai stakeholder,

termasuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, yang menciptakan sinergi positif; serta sinergitas antara pemuka agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama, yang merupakan elemen penting dalam menciptakan stabilitas sosial. Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang intensif, termasuk sosialisasi tentang bahaya narkoba dan peringatan hari anti narkoba, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, serta ketersediaan anggaran yang cukup dan tepat waktu untuk mendukung semua kegiatan, juga berperan penting. Penerapan kreativitas dan inovasi dalam metode pelaksanaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk penyampaian informasi dan edukasi, serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dan relevan, memberikan landasan yang kuat bagi keberhasilan program secara keseluruhan. Dengan demikian, melalui program ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, terdapat juga penguatan kerukunan antarumat beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang merupakan aspek integral dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Pada program ini, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

#### **VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program ini sampai dengan Bulan November Tahun 2023 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 89,29%. Faktor-faktor pendukung pencapaian Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, mencakup komitmen yang kuat dan konsisten dari pimpinan di berbagai tingkatan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, yang berperan penting dalam mendorong

pelaksanaan program; keterlibatan aktif dari berbagai stakeholder, termasuk lembaga pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, yang menciptakan sinergi positif dalam upaya meningkatkan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Program ini juga melibatkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi potensi ancaman dan konflik sosial di tingkat lokal. Keterlibatan FKDM dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah sangat penting dalam mengumpulkan informasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil. Sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang efektif memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program, serta melakukan perbaikan yang diperlukan secara tepat waktu. Kegiatan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, serta kewaspadaan perbatasan antar negara, menjadi bagian integral dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Ketersediaan anggaran yang cukup dan tepat waktu juga sangat mendukung pelaksanaan kegiatan, sementara penerapan kreativitas dan inovasi dalam metode pelaksanaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data dan informasi, meningkatkan efektivitas program. Dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dan relevan memberikan landasan yang kuat bagi keberhasilan program secara keseluruhan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kewaspadaan nasional, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial, yang merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang aman, harmonis, dan sejahtera, serta memperkuat peran FKDM dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Sebagian dari beberapa kegiatan, terdapat ada yang tidak terlaksana dikarenakan beberapa aturan dan kebijakan yang mempengaruhi pencapaian dari beberapa pencapaian target yang telah ditetapkan, hal tersebut mempengaruhi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga memberikan dampak kepada kurang optimalnya pencapaian target yang telah direncanakan.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Kota Bekasi (Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026)

| Kode            | Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)                                                                                                                                                                                         | Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 |                                             |                       | Target Program/Keg iatan Renja SKPD Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan |                                              | Catatan |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                             | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023                              | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2024)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |
| 1               | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                     | 5                                                                           | 6                                                                     | 7                                           | 8=(7/6)               | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                        | 11=(10/4)                                    | 12      |
|                 | PEMERINTAHAN UMUM                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                             |                                                                       |                                             |                       |                                                |                                                                   |                                              |         |
| 8.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 1. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur<br>2. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>4. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100%                                                  | 100%                                                                        | 100%                                                                  | 100%                                        | 100%                  | 100%                                           | 100%                                                              | 100%                                         |         |
| 8.01.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                       | 100%                                                  | 100                                                                         | 100%                                                                  | 100%                                        | 100%                  | 100%                                           | 100%                                                              | 100%                                         |         |
| 8.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan                                                                                                                                                                                                                                              | 3 Laporan                                             | 3 Laporan                                                                   | 3 Laporan                                                             | 3 Laporan                                   | 100%                  | 3 Laporan                                      | 3 Laporan                                                         | 100%                                         |         |
| 8.01.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        | 100%                                                  | 100                                                                         | 100%                                                                  | 100%                                        | 100%                  | 100%                                           | 100%                                                              | 100%                                         |         |
| 8.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Premi BPJS                                                                                                                                                                                                                   | 1.806 Orang/Bulan                                     | 1.061 Orang/Bulan                                                           | 0 Orang/Bulan                                                         | 0 Orang/Bulan                               | 90,37%                | 0                                              | 1.061 Orang/Bulan                                                 | 77,56%                                       |         |
|                 |                                                                                       | Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                             | 1.548 Orang/Bulan                                     | 1.492 Orang/Bulan                                                           | 1.080 Orang/Bulan                                                     | 976 Orang/Bulan                             |                       |                                                | 1.492 Orang/Bulan                                                 |                                              |         |
| 8.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Laporan                                             | 1 Laporan                                                                   | 1 Laporan                                                             | 1 Laporan                                   | 100%                  | 0 Laporan                                      | 2 Laporan                                                         | 100%                                         |         |
| 8.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan                                                                                                                                             | 36 Laporan                                            | 18 Laporan                                                                  | 18 Laporan                                                            | 18 Laporan                                  | 100%                  | 18 Laporan                                     | 36 Laporan                                                        | 100%                                         |         |

| Kode            | Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)                   | Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 |                                             |                       | Target Program/Keg iatan Renja SKPD Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan |                                              | Catatan |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|                 |                                                                            |                                                                                       |                                                       |                                                                             | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023                              | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2024)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |
| 1               | 2                                                                          | 3                                                                                     | 4                                                     | 5                                                                           | 6                                                                     | 7                                           | 8=(7/6)               | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                        | 11=(10/4)                                    | 12      |
|                 |                                                                            | Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD                                                   |                                                       |                                                                             |                                                                       |                                             |                       |                                                |                                                                   |                                              |         |
| 8.01.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                  | Persentase Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   | 100%                                                  | 100                                                                         | 100%                                                                  | 100%                                        | 100%                  | 0%                                             | 100%                                                              | 100%                                         |         |
| 8.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                     | Jumlah Pegawai                                                                        | 540 Stell                                             | 180 Stell                                                                   | 0 Stell                                                               | 0 Stell                                     | 0%                    | 0 Stell                                        | 180 Stell                                                         | 33,33%                                       |         |
| 8.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi              | Jumlah Pegawai                                                                        | 36 Orang                                              | 8 Orang                                                                     | 8 Orang                                                               | 8 Orang                                     | 22,22%                | 8 Orang                                        | 8 Orang                                                           | 22,22%                                       |         |
| 8.01.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                   | Jumlah Peserta                                                                        | 55 Orang                                              | -                                                                           | 0 Orang                                                               | 0 Orang                                     | 0%                    | 0                                              | 0                                                                 | 0%                                           |         |
| 8.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                 | Jumlah Peserta                                                                        | 55 Orang                                              | -                                                                           | 0 Orang                                                               | 0 Orang                                     | 0%                    | 0                                              | 0                                                                 | 0%                                           |         |
| 8.01.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                         | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                         | 100%                                                  | 100                                                                         | 100%                                                                  | 100%                                        | 100%                  | 100%                                           | 100%                                                              | 100%                                         |         |
| 8.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                           | Jumlah Bahan Logistik                                                                 | 19.516 Unit                                           | 11.244 Unit                                                                 | 11.244 Unit                                                           | 11.244 Unit                                 | 100%                  | 11.244 Unit                                    | 11.244 Unit                                                       | 57,61%                                       |         |
| 8.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                  | Jumlah Penggandaan                                                                    | 80.000 Lembar                                         | 80.000 Lembar                                                               | 80.000 Lembar                                                         | 80.000 Lembar                               | 100%                  | 96.000 Lembar                                  | 96.000 Lembar                                                     | 120%                                         |         |
| 8.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                   | Jumlah bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan                                     | 16.000 Buku/exemplar                                  | 10.500 Buku/exemplar                                                        | 5.500 Buku/exemplar                                                   | 5.500 Buku/exemplar                         | 100%                  | 10.500 Buku/exemplar                           | 10.500 Buku/exemplar                                              | 65,63%                                       |         |
| 8.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/perjalanan dinas | 497 Kali                                              | 187 Kali                                                                    | 117 Kali                                                              | 107 Kali                                    | 91,45%                | 187 Kali                                       | 187 Kali                                                          | 37,62%                                       |         |
| 8.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                      | Jumlah Arsip yang ditata/ dikelola                                                    | 1250 Box                                              | 900 Box                                                                     | 100 Box                                                               | 100 Box                                     | 100%                  | 1000 Box                                       | 1000 Box                                                          | 80%                                          |         |
| 8.01.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | 100%                                                  | 100                                                                         | 100%                                                                  | 100%                                        | 100%                  | 100%                                           | 100%                                                              | 100%                                         |         |
| 8.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                      | Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor                                                   | 384 Orang/Bulan                                       | 120 orang/bulan                                                             | 120 orang/bulan                                                       | 120 orang/bulan                             | 100%                  | 0                                              | 360 orang/bulan                                                   | 93,75%                                       |         |
| 8.01.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | 100%                                                  | 100                                                                         | 100%                                                                  | 100%                                        | 100%                  | 100%                                           | 100%                                                              | 100%                                         |         |
| 8.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak                 | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan                                                        | 66 Unit                                               | 66 Unit                                                                     | 22 Unit                                                               | 22 Unit                                     | 100%                  | 0                                              | 66 Unit                                                           | 100%                                         |         |

| Kode            | Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)                                                                                                                    | Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 |                                             |                       | Target Program/Keg iatan Renja SKPD Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan |                                              | Catatan |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                             | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023                              | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2024)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |
| 1               | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                      | 4                                                     | 5                                                                           | 6                                                                     | 7                                           | 8=(7/6)               | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                        | 11=(10/4)                                    | 12      |
|                 | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                             |                                                                       |                                             |                       |                                                |                                                                   |                                              |         |
| 8.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                        | Jumlah Peralatan                                                                                                                                                                       | 75 Unit                                               | 75 Unit                                                                     | 25 Unit                                                               | 25 Unit                                     | 100%                  | 0                                              | 75 Unit                                                           | 100%                                         |         |
| 8.01.02         | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                    | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                        | 50%                                                   | -                                                                           | 50%                                                                   | 50%                                         | 100%                  | 0                                              | 50%                                                               | 100%                                         |         |
| 8.01.02.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                         | Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi                                                                                  | 100%                                                  | 0%                                                                          | 23,19%                                                                | 23,19%                                      | 100%                  | 0                                              | 23,19%                                                            | 23,19%                                       |         |
| 8.01.02.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah peserta pembinaan bela negara                                                                                                                                                   | -                                                     | -                                                                           | 60 Orang                                                              | 60 Orang                                    | 100%                  | 0                                              | 60 Orang                                                          | 100%                                         |         |
| 8.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan      | Jumlah peserta pemantapan ideologi bangsa dan nilai-nilai pancasila                                                                                                                    | 70 Orang                                              | 0 Orang                                                                     | 70 Orang                                                              | 70 Orang                                    | 100%                  | 0                                              | 70 Orang                                                          | 100%                                         |         |
|                 |                                                                                                                                                                 | Jumlah peserta pembinaan bela negara                                                                                                                                                   | 460 Orang                                             | 100 Orang                                                                   | 85 Orang                                                              | 40 Orang                                    | 100%                  | 0                                              | 100 Orang                                                         | 21,73%                                       |         |
|                 |                                                                                                                                                                 | Jumlah Peserta Wawasan Kebangsaan                                                                                                                                                      | 3050 Orang                                            | 0 Orang                                                                     | 0 Orang                                                               | 0 Orang                                     | 0%                    | 0                                              | 0 Orang                                                           | 0%                                           |         |
|                 |                                                                                                                                                                 | Jumlah Peserta Penguatan ideologi pancasila melalui tema kebangsaan                                                                                                                    | 120 Orang                                             | 0 Orang                                                                     | 0 Orang                                                               | 0 Orang                                     | 0%                    | 0                                              | 0 Orang                                                           | 0%                                           |         |
|                 |                                                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 690 Orang                                             | 0 Orang                                                                     | 0 Orang                                                               | 0 Orang                                     | 0%                    | 0                                              | 0 Orang                                                           | 0%                                           |         |

| Kode            | Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)                                                                                                                                                                                                              | Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 |                                             |                       | Target Program/Keg iatan Renja SKPD Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan |                                              | Catatan |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                             | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023                              | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2024)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                     | 5                                                                           | 6                                                                     | 7                                           | 8=(7/ 6)              | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                        | 11=(10/ 4)                                   | 12      |
| 8.01.03         | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          | Persentase peningkatan pembinaan politik daerah                                                                                                                                                                                                                                  | 23%                                                   | 5%                                                                          | 5%                                                                    | 5%                                          | 100%                  | 5%                                             | 23%                                                               | 100%                                         |         |
| 8.01.03.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah penyelenggaraan pendidikan politik                                                                                                                                                                                                                                        | 2840 Orang                                            | 2.860 Orang                                                                 | 2.260 Orang                                                           | 2.260 Orang                                 | 100%                  | 100%                                           | 2.860 Orang                                                       | 100,7%                                       |         |
| 8.01.03.2.01.01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                 | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 9 Dokumen                                             | 11 Dokumen                                                                  | 11 Dokumen                                                            | 11 Dokumen                                  | 100%                  | 11 Dokumen                                     | 11 Dokumen                                                        | 122,2%                                       |         |
| 8.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta                                                         | Jumlah Peserta Pembinaan Pendidikan Politik                                                                                                                                                                                                                                      | 2840 Orang                                            | 2.860 Orang                                                                 | 2.260 Orang                                                           | 2.260 Orang                                 | 100%                  | 100%                                           | 2.860 Orang                                                       | 100,7%                                       |         |

| Kode            | Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)                                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 |                                             |                       | Target Program/Keg iatan Renja SKPD Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan |                                              | Catatan |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                             | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023                              | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2024)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                     | 5                                                                           | 6                                                                     | 7                                           | 8=(7/6)               | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                        | 11=(10/4)                                    | 12      |
|                 | Pemantauan Situasi Politik Di Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                             |                                                                       |                                             |                       |                                                |                                                                   |                                              |         |
| 8.01.03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         | Jumlah partai politik yang mendapat bantuan keuangan                                                                                                                                                                                                                                          | 16 Partai Politik                                     | 8 Partai Politik                                                            | 8 Partai Politik                                                      | 8 Partai Politik                            | 100%                  | 8 Partai Politik                               | 16 Partai Politik                                                 | 100%                                         |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah lembaga yang mendapat bantuan dana hibah                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Lembaga                                             | 1 Lembaga                                                                   | 2 Lembaga                                                             | 1 Lembaga                                   | -                     | -                                              | 2 Lembaga                                                         | 66,67%                                       |         |
| 8.01.03.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 12 Laporan                                            | 12 Laporan                                                                  | 12 Laporan                                                            | 12 Laporan                                  | 100%                  | 12 Laporan                                     | 12 Laporan                                                        | 100%                                         |         |
| 8.01.04         | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                        | Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                                  | 100%                                                                        | 100%                                                                  | 100%                                        | 100%                  | 100%                                           | 100%                                                              | 100%                                         |         |
| 8.01.04.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                   | Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertib administrasi di Kota Bekasi                                                                                                                                                                                                | 30 Ormas                                              | 37 Ormas                                                                    | 26 Ormas                                                              | 24 Ormas                                    | 92,3%                 | 0 Ormas                                        | 37 Ormas                                                          | 123,3%                                       |         |
| 8.01.04.2.01.01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,                                                                                                                                                                                                                 | 24 Dokumen                                            | 26 Dokuemen                                                                 | 26 Dokumen                                                            | 24 Dokumen                                  | 92,3%                 | 92,3 Dokumen                                   | 24 Dokumen                                                        | 100%                                         |         |

| Kode            | Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)                                                     | Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 |                                             |                       | Target Program/Keg iatan Renja SKPD Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan |                                              | Catatan |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                       |                                                                             | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023                              | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2024)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                       | 4                                                     | 5                                                                           | 6                                                                     | 7                                           | 8=(7/6)               | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                        | 11=(10/4)                                    | 12      |
|                 | Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                          | Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun                            |                                                       |                                                                             |                                                                       |                                             |                       |                                                |                                                                   |                                              |         |
| 8.01.04.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                       | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat Bantuan Dana Hibah                                                       | 17 Ormas                                              | 11 Ormas                                                                    | 6 Ormas                                                               | 6 Ormas                                     | 100%                  | 0 Ormas                                        | 17 Ormas                                                          | 56,6%                                        |         |
| 8.01.04.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah               | Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017                        | 540 Orang                                             | 300 Orang                                                                   | 300 Orang                                                             | 251 Orang                                   | 83,7%                 | 83,7%                                          | 551 Orang                                                         | 102%                                         |         |
| 8.01.05         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                    | Cakupan masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya                | 0,18%                                                 | 0,18                                                                        | 0,18%                                                                 | 100%                                        | 100%                  | 0,18%                                          | 0,18%                                                             | 100%                                         |         |
| 8.01.05.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                           | Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                               | 100%                                                  | 100%                                                                        | 100%                                                                  | 100%                                        | 100%                  | 100%                                           | 100%                                                              | 100%                                         |         |
| 8.01.05.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Terlaksananya Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional                                                              | 3 Kali                                                | 0 Kali                                                                      | 1 Kali                                                                | 1 Kali                                      | 100%                  | 0                                              | 1 Kali                                                            | 33,33%                                       |         |
|                 |                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Narkoba                                                                                | 450 Orang                                             | 0 Orang                                                                     | 150 Orang                                                             | 150 Orang                                   | 100%                  | 0                                              | 150 Orang                                                         | 33,33%                                       |         |
|                 |                                                                                                                                                                                             | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan | 2450 Orang                                            | 1200 Orang                                                                  | 1250 Orang                                                            | 1250 Orang                                  | 100%                  | 1250 Orang                                     | 2500 Orang                                                        | 102%                                         |         |

| Kode            | Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)                                                                                                                                                                                                                  | Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 |                                             |                       | Target Program/Keg iatan Renja SKPD Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan |                                              | Catatan |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                             | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023                              | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2024)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                     | 5                                                                           | 6                                                                     | 7                                           | 8=(7/6)               | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                        | 11=(10/4)                                    | 12      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                             |                                                                       |                                             |                       |                                                |                                                                   |                                              |         |
| 8.01.06         | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                       | Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan                                                                                                                                                                                                      | 100%                                                  | 100%                                                                        | 100%                                                                  | 100%                                        | 100%                  | 100%                                           | 100%                                                              | 100%                                         |         |
| 8.01.06.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                         | Persentase Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Bekasi                                                                                                                                                                                                | 100%                                                  | 100%                                                                        | 100%                                                                  | 100%                                        | 100%                  | 100%                                           | 100%                                                              | 100%                                         |         |
| 8.01.06.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 400 Orang                                             | 400 Orang                                                                   | 400 Orang                                                             | 400 Orang                                   | 100%                  | 400 Orang                                      | 400 Orang                                                         | 100%                                         |         |
| 8.01.06.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kewaspadaan Dini Daerah                                                                                                                                                                                                                                         | 24 Dokumen                                            | 12 Dokuem                                                                   | 12 Dokumen                                                            | 12 Dokumen                                  | 100%                  | 0                                              | 24 Dokumen                                                        | 100%                                         |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Pendataan Orang Asing                                                                                                                                                                                                                              | 3 Kegiatan                                            | 0 Kegiatan                                                                  | 3 Kegiatan                                                            | 3 Kegiatan                                  | 100%                  | 0                                              | 3 Kegiatan                                                        | 100%                                         |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah peserta Sosialisasi Orang Asing                                                                                                                                                                                                                                               | 120 Orang                                             | 0 Orang                                                                     | 120 Orang                                                             | 108 Orang                                   | 90%                   | 0                                              | 108 Orang                                                         | 90%                                          |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja                                                                                                                                                                                            | 12 Laporan                                            | 12 Laporan                                                                  | 12 Laporan                                                            | 12 Laporan                                  | 100%                  | 12 Laporan                                     | 12 Laporan                                                        | 100%                                         |         |

| Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)                                                                                                                              | Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 |                                             |                       | Target Program/Keg iatan Renja SKPD Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan |                                              | Catatan |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                             | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023                              | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2024)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |
| 1    | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                | 4                                                     | 5                                                                           | 6                                                                     | 7                                           | 8=(7/6)               | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                        | 11=(10/4)                                    | 12      |
|      |                                                                            | Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                                       |                                                                             |                                                                       |                                             |                       |                                                |                                                                   |                                              |         |

(Sumber : Renstra Perubahan Bakesbangpol Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Badan Kesbangpol 2023 dan Renstra Teknokratik Bakesbangpol Tahun 2024-2026)

Berdasarkan penjelasan tabel di atas Badan Kesbangpol telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja program dan kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol adalah dengan melakukan efektivitas dan efisien dalam memaksimalkan pagu anggaran yang ada pada setiap Program dan Kegiatan, hal itu dilakukan agar tercapainya target kinerja yang ditetapkan Badan Kesbangpol.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi**

Keberhasilan penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat melalui sinergi perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat nasional dengan perencanaan yang berada di level daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah melakukan penyesuaian pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Seluruh dasar hukum pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi mengacu/mengadopsi dasar hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Saat ini, produk layanan yang diberikan Badan Kesbangpol Kota Bekasi kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Surat Tanda Laport Keberadaan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang berdomisili di Kota Bekasi. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) merupakan produk hukum Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang merupakan implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Penerbitan SKT ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah kepada Panitia Pendirian Rumah Ibadah. Surat pertimbangan ini merupakan produk hukum yang didasari oleh Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian RUMah Ibadat. Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

- 3) Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor Orang Asing. Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor Orang asing ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Bidang Politik Dalam Negeri;
- 5) Fasilitasi kegiatan kerukunan umat beragama melalui kegiatan roadshow, seminar, sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD), pelayanan tersebut menjadi tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 6) Pembinaan Pendidikan Politik untuk masyarakat pemula dan partai politik. Kegiatan ini merupakan tupoksi pada Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Bidang Politik Dalam Negeri;
- 7) Pembinaan bela negara, Penguatan ideologi pancasila melalui tema kebangsaan, Pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk masyarakat pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik dan anggota Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa;
- 8) Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Badan Kesbangpol memfasilitasi kegiatan tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Kegiatan ini merupakan sebagai sarana untuk mencetak calon-calon pemimpin berkarakter Pancasila yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara yang tinggi.
- 9) Fasilitasi bantuan hibah kepada Forum/Organisasi bentukan pemerintah dan Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang

Kemasyarakatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

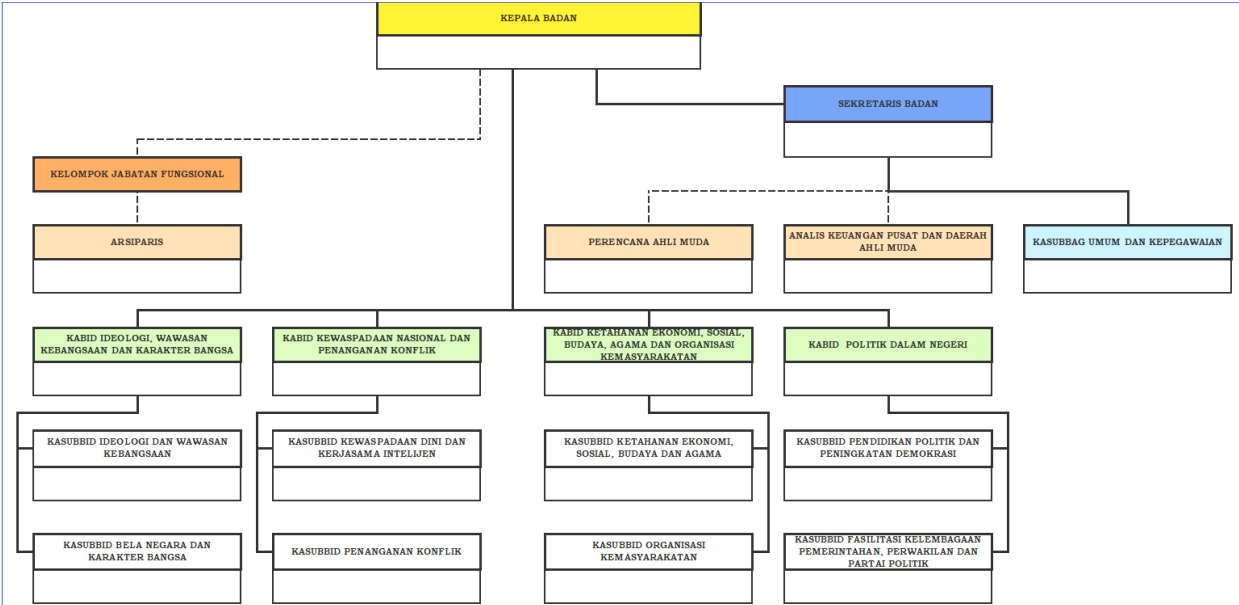
- 10) Fasilitasi bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik;
- 11) Fasilitasi Hibah kepada Lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang, Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 12) Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Forkopimda Tim Sekretariat Forkopimda memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional, Badan Kesbangpol telah menyediakan anggaran dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas Forkopimda di Kota Bekasi;
- 13) Fasilitasi tim kewaspadaan deteksi dini daerah yang bertujuan untuk memantau perkembangan kantrantibmas dan kerawanan sosial-politik di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Selain itu, pelayanan Badan Kesbangpol kepada masyarakat juga dilakukan ke dalam bentuk pelaksanaan belanja urusan. Belanja urusan ini berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi yang dilaksanakan pada Badan Kesbangpol. Pada Tahun 2023 belanja urusan Badan Kesbangpol sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi di dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi Badan dalam melaksanakan kegiatan urusan antara lain:

- 1) Masih adanya *misedlink* capaian yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap capaian yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- 2) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol;

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dijelaskan bahwa struktur organisasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi terdiri dari 1 (satu) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Badan, yang dibantu oleh 5 (lima) pejabat Administrator, 9 (sembilan) pejabat pengawas dan kelompok jabatan fungsional.

**Gambar 2. 1 Struktur Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi**  
(Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021)



Sumber daya Badan Kesbangpol Kota Bekasi terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Aset. SDM merupakan faktor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, SDM merupakan penggerak utama dari organisasi tersebut. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2023, Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki jumlah pegawai sebanyak 51 orang, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Menurut Esselonoring (Data Mei 2024)**

| NO                   | Esselon | A   |   | B   |   | Jumlah | Ket |
|----------------------|---------|-----|---|-----|---|--------|-----|
|                      |         | L   | P | L   | P |        |     |
| 1                    | II      | -   | - | 1   | - | 1      |     |
| 2                    | III     | 1   | - | 3   | 1 | 5      |     |
| 3                    | IV      | 6   | 2 | -   | - | 8      |     |
|                      | Pangkat | ASN |   | TKK |   |        |     |
| 1                    | Jafung  | -   | 3 | -   | - | 3      |     |
| 2                    | Staff   | 15  | 6 | 5   | 5 | 31     |     |
| Jumlah Total Esselon |         |     |   |     |   | 48     |     |

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2018-2023 (Rencana Strategis Perubahan Bakesbangpol Tahun 2018-2023)

| NO  | Indikator                                                                                                                                                                                                    | SPM/<br>standar<br>nasional | IKK | Target Renstra SKPD |      |        |        |        | Realisasi Capaian |      |        |        |        | Catatan Analisis                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|------|--------|--------|--------|-------------------|------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                              |                             |     | 2019                | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2019              | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   |                                                                                               |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                          | (3)                         | (4) | (5)                 | (6)  | (7)    | (8)    | (9)    | (10)              | (11) | (12)   | (13)   | (14)   | (14)                                                                                          |
| 1   | Nilai AKIP Kesbangpol<br>(Hasil Evaluasi SAKIP PD dari Inspektorat)                                                                                                                                          | -                           | -   | -                   | -    | Bb     | Bb     | Bb     | -                 | -    | Bb     | Bb     | Bb     | Penyesuaian indikator pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Bakesbangpol Tahun 2021-2023 |
| 2   | Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan<br>- Rumus :<br>$\frac{\text{Jml. konflik SARA yang diselesaikan (n)}}{\text{Jml. konflik SARA yang dilaporkan (n)}} \times 100$                        | -                           | -   | -                   | -    | 100%   | 100%   | 100%   | -                 | -    | 100    | 100%   | 100%   |                                                                                               |
| 3.  | Persentase partisipasi masyarakat dalam politik<br>- Rumus :<br>$= \frac{\text{Jumlah pembinaan politik oleh Badan Kesbangpol (n)}}{\text{Jumlah total Pembinaan Politik (n)}} \times 100\%$                 | -                           | -   | -                   | -    | 54,37% | 58,56% | 88,56% | -                 | -    | 54,37% | 58,56% | 88,56% |                                                                                               |
| 4.  | Persentase Ormas yang Berpreran Aktif dalam Pembangunan Daerah<br>- Rumus :<br>$= \frac{\text{Jml. Ormas Tertib Administrasi (n)}}{\text{Jml. Total Ormas Tercatat di Kesbangpol Kota Bekasi}} \times 100\%$ | -                           | -   | -                   | -    | 64,2%  | 77,1%  | 90%    | -                 | -    | 64,2%  | 77,1%  | 90%    |                                                                                               |

(Sumber : Rencana Strategis Perubahan Bakesbangpol Tahun 2018-2023 dan IKU Bakesbangpol)

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2024-2026 (Rencana Strategis Teknokratik Bakesbangpol Tahun 2024-2026)

| NO  | Indikator                                                                                                                                                                          | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD |      |      | Realisasi Capaian |      |      | Catatan Analisis                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------|------|------|-------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                    |                       |     | 2024                | 2025 | 2026 | 2024              | 2025 | 2026 |                                                                                     |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                | (3)                   | (4) | (5)                 | (6)  | (7)  | (8)               | (9)  | (10) | (11)                                                                                |
| 1   | Nilai AKIP Kesbangpol<br>(Hasil Evaluasi SAKIP PD dari Inspektorat)                                                                                                                | -                     | -   | Bb                  | Bb   | Bb   | Bb                | -    | -    | Indikator pada Rencana Strategis (RENSTRA) Teknokratik Bakesbangpol Tahun 2024-2026 |
| 2   | Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan<br>- Rumus :<br>$\frac{\text{Jml. konflik SARA yang dilaporkan (n)}}{\text{Jml. konflik SARA yang ditangani (n)}} \times 100$ | -                     | -   | 100%                | 100% | 100% | 100               | -    | -    |                                                                                     |

(Sumber : Rencana Strategis Teknokratis Bakesbangpol Tahun 2024-2026 dan IKU Bakesbangpol)

### 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagai kawasan perkotaan dengan heterogenitas, mobilitas masyarakat, dan dinamika sosial, ekonomi dan politik yang tinggi, permasalahan kota metropolitan yang terjadi Indonesia ini berlaku pula di Kota Bekasi. Permasalahan itu meliputi aspek ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi, serta keamanan dan ketertiban.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa dan negara diwaktu-waktu mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mampu mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis baik nasional maupun di daerah. Terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, tantangan ini juga menjadi dasar dan kerangka penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depannya yakni penguatan persatuan dan kesatuan serta pembangunan sistem politik demokrasi.

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
  - 1) Belum optimalnya pendayagunaan SDM aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
  - 2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan database Partai Politik, Ormas/LSM, OKP;
  - 3) Masih diperlukan peningkatan dukungan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan wawasan kebangsaan dalam rangka penciptaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
  - 4) Terbatasnya dukungan anggaran operasional Pemerintah Daerah.
- Tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
  - 1) Letak geografis Kota Bekasi yang menjadi jalur utama lalu lintas dan mobilitas manusia antara kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta dan daerah lainnya telah menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah transit dan tujuan utama berbagai aksi kejahatan transnasional dalam bentuk seperti penyelundupan narkoba, human trafficking, pencurian dan aksi terorisme;
  - 2) Potensi konflik sosial yang masih tinggi antar Ormas/LSM dan OKP dalam memperebutkan lahan/daerah yang diakibatkan masih tingginya tingkat pengangguran;

- 3) Kesenjangan sosial antara pendatang yang makmur dan pandai (*welleducated*) dengan penduduk pribumi yang masih berpendidikan dan berpenghasilan rendah;
  - 4) Tingkat urbanisasi yang tinggi ke wilayah Kota Bekasi dari berbagai daerah dapat menimbulkan kelangkaan lapangan pekerjaan sehingga rentan terjadinya konflik sosial.
- Peluang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
    - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan basis teknologi informatika;
    - 2) Memperluas jejaring informasi pencegahan dini dengan melibatkan peranserta seluruh elemen masyarakat dalam forum-forum kemasyarakatan yang dapat ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dibentuk mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga sampai ke pranata lembaga pemerintahan yang paling dekat dapat dijangkau oleh masyarakat Kota Bekasi;
    - 3) Memperkuat peran kelembagaan sosial kemasyarakatan melalui program pengembangan kerjasama Pemerintah Daerah dengan unsur masyarakat yang diwakili misalnya oleh Ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
    - 4) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, misalnya pihak Sekolah SMA/SMK sederajat dan Universitas, dalam melakukan upaya pengembangan program dan pemahaman pentingnya fungsi dan tugas bidang kesatuan bangsa yang diemban oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
  - Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti  
 Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diurai dimuka maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
    - 1) Program dan kegiatan pendukung pelayanan administrasi perkantoran hendaknya ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya karena beberapa item kegiatan dan penganggaran merupakan dukungan secara langsung pada program dan kegiatan teknis.

- 2) Penentuan sub kegiatan pada kegiatan teknis harus memperhatikan sebaran sasaran baik itu secara kualitas maupun kuantitas.
- 3) Memungkinkan adanya sub kegiatan baru dalam mengoptimalkan ketercapainya tujuan dan sasaran OPD untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Pemerintah Kota Bekasi disandingkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

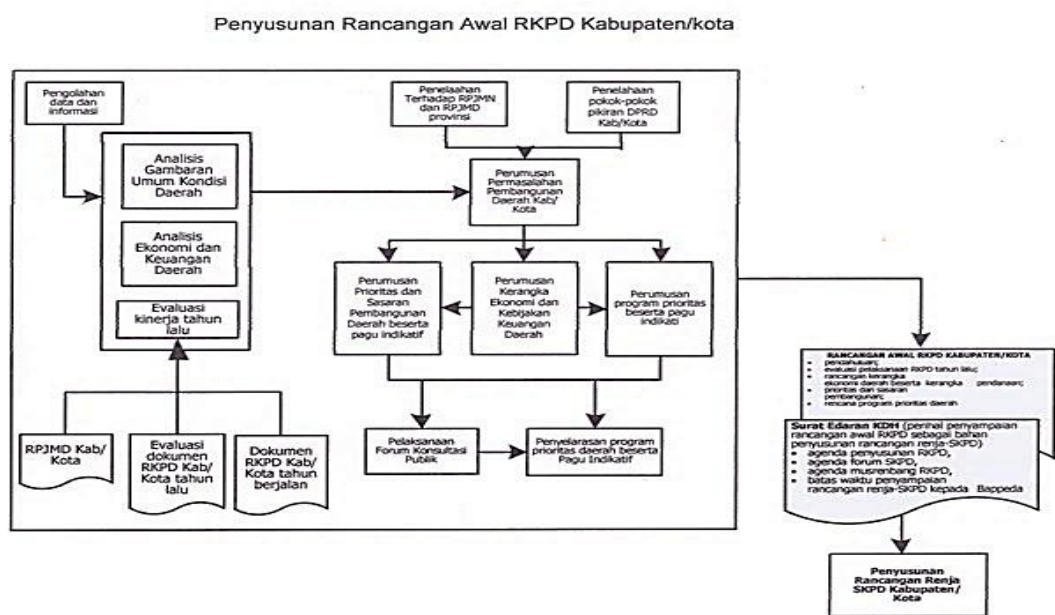
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Bakesbangpol) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Bakesbangpol) Tahun 2025 yang disusun memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Kesbangpol) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merupakan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2025 yang merupakan penyelarasan program secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Bakesbangpol) oleh karena itu perlu dilakukan review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tersebut. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara hasil analisis kebutuhan terhadap Program dan Kegiatan beserta Rencana Kebutuhan Dana yang termuat dalam dokumen (Renja-Bakesbangpol) yang disusun dari tahap Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir dan apabila ada koreksi atau terdapat perbedaan dalam hasil review pada setiap tahap penyusunannya dapat diperbaiki atau disempurnakan.

Secara keseluruhan, Review terhadap rancangan awal RKPD hasil telaahan terhadap Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 2. 2 Alur Rancangan Awal RKPD dan Renja PD



Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                       | Hasil Analisis Kebutuhan                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                       | Catatan |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------|
|     | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                       | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian   | Pagu Indikatif        | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                       | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian   | Pagu Indikatif        |         |
| (1) | (2)                                                                                   | (3)    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                         | (5)              | (6)                   | (7)                                                                                   | (8)    | (9)                                                                                                                                                                                                                                                         | (10)             | (11)                  | (12)    |
| I   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | SKPD   | 1. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur<br>2. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>4. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100%             | <b>11,114,671,740</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | SKPD   | 1. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur<br>2. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>4. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100%             | <b>12,017,660,960</b> |         |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | SKPD   | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                       | 100%             | 40,000,000            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | SKPD   | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                       | 100%             | 25,000,000            |         |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                      | 1 Laporan        | 40,000,000            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                      | 1 Laporan        | 25,000,000            |         |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | SKPD   | Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                      | 100%             | 8,904,620,000         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | SKPD   | Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                      | 100%             | 9,113,062,000         |         |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | SKPD   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                           | 1134 Orang/Bulan | 8,894,620,000         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | SKPD   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                           | 1026 Orang/bulan | 9,098,062,000         |         |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | SKPD   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan                                                                                                                                             | 18 Laporan       | 10,000,000            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | SKPD   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan                                                                                                                                                      | 16 Laporan       | 15,000,000            |         |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                    |        |                                                                                                     |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                               |        |                                                                                                     |                   |                | Catatan |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|
|     | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                     | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                   | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                     | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                   | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif |         |
| (1) | (2)                                                                    | (3)    | (4)                                                                                                 | (5)               | (6)            | (7)                                                                    | (8)    | (9)                                                                                                 | (10)              | (11)           | (12)    |
|     |                                                                        |        | Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD                                                              |                   |                |                                                                        |        | Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD                                                  |                   |                |         |
|     | Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | SKPD   | Persentase Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                                          | 100%              | 330,000,000    | Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | SKPD   | Persentase Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                                          | 100%              | 490,000,000    |         |
|     | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan              | SKPD   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                        | 52 Paket          | 150,000,000    | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan              | SKPD   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                        | 52 Paket          | 200,000,000    |         |
|     | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi | SKPD   | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan     | 12 Orang          | 30,000,000     | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi | SKPD   | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan     | 12 Oran<br>g      | 40,000,000     |         |
|     | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan       | SKPD   | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan | 52 Orang          | 150,000,000    | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan       | SKPD   | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan | 52<br>Orang       | 250,000,000    |         |
|     | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                  | SKPD   | Persentase Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                 | 100%              | 900,000,000    | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                  | SKPD   | Persentase Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                 | 100%              | 1,075,000,000  |         |
|     | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                    | SKPD   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                            | 3 Paket           | 350,000,000    | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                    | SKPD   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                            | 3 Paket           | 350,000,000    |         |
|     | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                        | SKPD   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                                | 1 Paket           | 75,000,000     | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                        | SKPD   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                                | 1 Paket           | 75,000,000     |         |
|     | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan         | SKPD   | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan               | 2<br>Dokumen      | 75,000,000     | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan         | SKPD   | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan               | 2<br>Dokume<br>n  | 50,000,000     |         |
|     | Fasilitasi Kunjungan<br>Tamü                                           | SKPD   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | -                 | -              | Fasilitasi Kunjungan<br>Tamü                                           | SKPD   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | 12<br>Laporan     | 150,000,000    |         |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                                |                |                                                                                                        |                   |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                           |                |                                                                                                         |                   |                      | Catatan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|
|     | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                 | Lokasi         | Indikator Kinerja                                                                                      | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif       | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                 | Lokasi         | Indikator Kinerja                                                                                       | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif       |         |
| (1) | (2)                                                                                                                | (3)            | (4)                                                                                                    | (5)               | (6)                  | (7)                                                                                                                | (8)            | (9)                                                                                                     | (10)              | (11)                 | (12)    |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | SKPD           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 150 Laporan       | 250,000,000          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | SKPD           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | 12 Laporan        | 350,000,000          |         |
|     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | SKPD           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 250 Dokumen       | 100,000,000          | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | SKPD           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                    | 12 Dokumen        | 100,000,000          |         |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | SKPD           | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            | 0%                | 0                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | SKPD           | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | 100%              | 300,000,000          |         |
|     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | SKPD           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | -                 | -                    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | SKPD           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                 | 34 Unit           | 300,000,000          |         |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | SKPD           | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | 100%              | 551.396.330          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | SKPD           | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         | 100%              | 514,598,960          |         |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | SKPD           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan        | 550,051,740          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | SKPD           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                    | 12 Laporan        | 514,598,960          |         |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | SKPD           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100%              | 440,000,000          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | SKPD           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100%              | 500,000,000          |         |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | SKPD           | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 22 Unit           | 340,000,000          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | SKPD           | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Di pelihara dan dibayarkan Pajaknya | 22 Unit           | 400,000,000          |         |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | SKPD           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 25 Unit           | 100,000,000          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | SKPD           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                      | 25 Unit           | 100,000,000          |         |
| II  | <b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                                | Jawa Barat dan | Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                      | 100%              | <b>2,390,812,860</b> | <b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                                | Jawa Barat dan | Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                       | 100%              | <b>2,812,569,800</b> |         |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                        |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                        |                |                | Catatan                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                            | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                            | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      | Target Capaian | Pagu Indikatif |                                                                                                                         |
| (1) | (2)                                                                                                                                                        | (3)                        | (4)                                                                                                                                                                                    | (5)            | (6)            | (7)                                                                                                                                                        | (8)                        | (9)                                                                                                                                                                                    | (10)           | (11)           | (12)                                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                            | Kota Bekasi                |                                                                                                                                                                                        |                |                |                                                                                                                                                            | Kota Bekasi                |                                                                                                                                                                                        |                |                |                                                                                                                         |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                    | Jawa Barat dan Kota Bekasi | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                          | 690 Orang      | 2,390,812,860  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                    | Jawa Barat dan Kota Bekasi | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                          | 200 Orang      | 2,812,569,800  |                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                            |                            | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                          |                |                |                                                                                                                                                            |                            | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                          | 354 Orang      |                |                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                            |                            | Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka                                                                                                                   |                |                |                                                                                                                                                            |                            | Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka                                                                                                                   | 2 Dokumen      |                |                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                            |                            | Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka                                                                                                                                           |                |                |                                                                                                                                                            |                            | Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka                                                                                                                                           | 52 Orang       |                |                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                        |                |                |                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                        |                |                |                                                                                                                         |
|     | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jawa Barat dan Kota Bekasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 690 Orang      | 2,390,812,860  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jawa Barat dan Kota Bekasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 200 Orang      | 896,130,000    | Penyesuaian Nomenklatur Sub Kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil |
|     | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran                                                      | Kota Bekasi                | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter                                                                                    | -              | -              |                                                                                                                                                            |                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter                                                                                    | 354 Orang      | 580,940,500    | Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,                                                        |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       | Catatan                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif        | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif        |                                                                        |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)         | (4)                                                                                                                                                                                                                                                              | (5)               | (6)                   | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                             | (8)         | (9)                                                                                                                                                                                                                                                              | (10)              | (11)                  | (12)                                                                   |
|     | Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                                                                                                                          |             | Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                                                                                         |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                                                                                         |                   |                       | Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah |
|     | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                                                                                 | Kota Bekasi | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka                                                                                                                                                                     | -                 | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka                                                                                                                                                                     | 2 Dokumen         | 181,762,000           |                                                                        |
|     | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                          | Kota Bekasi | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                | -                 | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                | 52 Orang          | 1,153,737,300         |                                                                        |
| III | <b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>                                                                                                                                   | Kota Bekasi | Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah                                                                                                                                                                                                                            | 100 %             | <b>11,750,000,000</b> | <b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>                                                                                                                                   | Kota Bekasi | Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah                                                                                                                                                                                                                            | 100 %             | <b>15,750,000,000</b> |                                                                        |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Kota Bekasi | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 12 Dokumen        | 11,750,000,000        | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Kota Bekasi | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 12 Dokumen        |                       |                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai                                                                                                   | 1135 Orang        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai                                                                                                   | 1504 Orang        | 750,000,000           |                                                                        |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       | Catatan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|
|     | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif       | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif        |         |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)         | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (5)               | (6)                  | (7)                                                                                                                                                                                                                                                             | (8)         | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (10)              | (11)                  | (12)    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                                                                                                                                                                 |                   |                       |         |
|     | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Kota Bekasi | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 10 Dokumen        | 11,000,000,000       | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Kota Bekasi | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 12 Dokumen        | 15,000,000,000        |         |
|     | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah   | Kota Bekasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah    | 1135 Orang        | 750,000,000          | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah   | Kota Bekasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah    | 1504 Orang        | 750,000,000           |         |
| IV  | <b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                            | Kota Bekasi | Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %             | <b>9,500,000,000</b> | <b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                            | Kota Bekasi | Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %             | <b>9,8000,000,000</b> |         |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                    |                   |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                    |                   |                      | Catatan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|
|     | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                        | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif       | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                        | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif       |         |
| (1) | (2)                                                                                                                                                       | (3)         | (4)                                                                                                                                                                                | (5)               | (6)                  | (7)                                                                                                                                                       | (8)         | (9)                                                                                                                                                                                | (10)              | (11)                 | (12)    |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                        | Kota Bekasi | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                         | 32 Dokumen        | 9,500,000,000        | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                        | Kota Bekasi | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                         | 51 Dokumen        | 9,8000,000,000       |         |
|     |                                                                                                                                                           |             | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                             | 400 peserta       |                      |                                                                                                                                                           |             | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                             | 400 peserta       |                      |         |
|     | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Bekasi | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun         | 32 Dokumen        | 9,500,000,000        | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Bekasi | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun         | 51 Dokumen        | 9,000,000,000        |         |
|     | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah     | Kota Bekasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 400 peserta       | 400,000,000          | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah     | Kota Bekasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 400 peserta       | 800,000,000          |         |
| V   | <b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>                                                                           | Kota Bekasi | Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                       | 100 %             | <b>1,000,000,000</b> | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                                                  | Kota Bekasi | Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                       | 100 %             | <b>1,200,000,000</b> |         |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang                                                                                              | Kota Bekasi | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya                                                                                                                | 1700 Orang        | 1,000,000,000        | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang                                                                                              | Kota Bekasi | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya                                                                                                                | 1900 Orang        | 1,200,000,000        |         |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      | Catatan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|
|     | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Lokasi         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif       | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Lokasi         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif       |         |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                     | (3)            | (4)                                                                                                                                                                                                                                                    | (5)               | (6)                  | (7)                                                                                                                                                                                                                     | (8)            | (9)                                                                                                                                                                                                                                                    | (10)              | (11)                 | (12)    |
|     | Ketahanan Ekonomi,<br>Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                 |                | dan Fasilitas<br>Pencegahan<br>Penyalagunaan<br>Narkotika, Fasilitas<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat Kepercayaan<br>di Daerah                                                                                                           |                   |                      | Ketahanan Ekonomi,<br>Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                 |                | dan Fasilitas<br>Pencegahan<br>Penyalagunaan<br>Narkotika, Fasilitas<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat Kepercayaan<br>di Daerah                                                                                                           |                   |                      |         |
|     | Pelaksanaan Kebijakan<br>di Bidang Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial,<br>Budaya dan Fasilitas<br>Pencegahan<br>Penyalagunaan<br>Narkotika, Fasilitas<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat Kepercayaan<br>di Daerah | Kota<br>Bekasi | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pelaksanaan<br>Kebijakan di Bidang<br>Ketahanan Ekonomi,<br>Sosial, Budaya dan<br>Fasilitas Pencegahan<br>Penyalagunaan<br>Narkotika, Fasilitas<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat Kepercayaan<br>di Daerah | 1700 Ora<br>ng    | 1,000,000,000        | Pelaksanaan Kebijakan<br>di Bidang Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial,<br>Budaya dan Fasilitas<br>Pencegahan<br>Penyalagunaan<br>Narkotika, Fasilitas<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat Kepercayaan<br>di Daerah | Kota<br>Bekasi | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pelaksanaan<br>Kebijakan di Bidang<br>Ketahanan Ekonomi,<br>Sosial, Budaya dan<br>Fasilitas Pencegahan<br>Penyalagunaan<br>Narkotika, Fasilitas<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat Kepercayaan<br>di Daerah | 1900 Or<br>ang    | 1,200,000,000        |         |
| VI  | <b>Program Peningkatan<br/>Kewaspadaan Nasional<br/>dan Peningkatan<br/>Kualitas dan Fasilitas<br/>Penanganan Konflik<br/>Sosial</b>                                                                                    | Kota<br>Bekasi | Optimalisasi<br>Penanganan Potensi<br>Konflik Daerah                                                                                                                                                                                                   | 100 %             | <b>2,375,000,000</b> | <b>Program Peningkatan<br/>Kewaspadaan Nasional<br/>dan Peningkatan<br/>Kualitas dan Fasilitas<br/>Penanganan Konflik<br/>Sosial</b>                                                                                    | Kota<br>Bekasi | Optimalisasi<br>Penanganan Potensi<br>Konflik Daerah                                                                                                                                                                                                   | 100 %             | <b>3,337,400,000</b> |         |
|     | Perumusan Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pelaksanaan<br>Pemantapan<br>Kewaspadaan Nasional<br>dan Penanganan<br>Konflik Sosial                                                                                              | Kota<br>Bekasi | Terlaksananya Kebijakan<br>di Bidang Kewaspadaan<br>Dini, Kerja Sama<br>Intelijen, Pemantauan<br>Orang Asing, Tenaga<br>Kerja Asing dan Lembaga<br>Asing, Kewaspadaan<br>Perbatasan Antar                                                              | 300<br>Orang      | 2,375,000,000        | Perumusan Kebijakan<br>Teknis dan Pelaksanaan<br>Pemantapan<br>Kewaspadaan Nasional<br>dan Penanganan Konflik<br>Sosial                                                                                                 | Kota<br>Bekasi | Terlaksananya Kebijakan<br>di Bidang Kewaspadaan<br>Dini, Kerja Sama<br>Intelijen, Pemantauan<br>Orang Asing, Tenaga<br>Kerja Asing dan<br>Lembaga Asing,<br>Kewaspadaan                                                                               | 250<br>Orang      | 3,337,400,000        |         |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                | Catatan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|
|     | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif |         |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)         | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (5)               | (6)            | (7)                                                                                                                                                                                                                                                      | (8)         | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (10)              | (11)           | (12)    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                                                                                                                                                                                |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                                                                                                                                                               |                   |                |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah  | 12 Laporan        |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah  | 12 Laporan        |                |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                        | 12 Dokumen        |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                        | 12 Dokumen        |                |         |
|     | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Bekasi | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 300 Orang         | 350,000,000    | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Bekasi | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 250 Orang         | 850,000,000    |         |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                | Catatan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|
|     | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif |         |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)         | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (5)               | (6)            | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (8)         | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (10)              | (11)           | (12)    |
|     | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Bekasi | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 12 Laporan        | 650,000,000    | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Bekasi | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 12 Laporan        | 537,200,000    |         |
|     | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      | Kota Bekasi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                          | 12 Dokumen        | 1,375,000,000  | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      | Kota Bekasi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                          | 12 Dokumen        | 1,955,000,000  |         |

(Sumber : Rencana Strategis Teknokratik Bakesbangpol Tahun 2024-2026)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam melakukan perumusan rencana program/kegiatan, Badan Kesbangpol selalu melibatkan *stakeholder* di dalam merumuskan perencanaan. Dari *stakeholder* tersebut akan terkumpul masukan dan aspirasi terkait perencanaan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam menjangring aspirasi tersebut, Badan Kesbangpol memulai dari tahapan Musrenbang tingkat Kecamatan, kemudian melalui Forum SKPD, dan diakhiri dalam Forum Musrenbang Tingkat Kota Bekasi.

Dari forum-forum penjangringan aspirasi/masukan tersebut, terdapat usulan dari masyarakat terkait pelaksanaan program/kegiatan SKPD. Usulan tersebut adalah :

Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Bekasi

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

| No  | Program/Kegiatan/Su<br>b Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                | Besaran/<br>Volume | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)         | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (5)                | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2   | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik                                                                                                                                          | Kota Bekasi | Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Kota Bekasi | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                 | Kota Bekasi | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 14.479.773.200     | Bantuan Keuangan ke Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi (Pagu Anggaran bersifat Proyeksi karena belum terselenggaranya pemilu yang menentukan jumlah partai politik yang akan mengisi di pos-parlemen dengan besaran perhitungan perolehan surat suara sah untuk Bantuan Parpol di TA. 2025) |
| 3   | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                   | Kota Bekasi | Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan                                                                                                                                                                                                   | Kota Bekasi | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                          | Besaran/Volume | Catatan                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)         | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (5)            | (6)                                                                                                                                   |
|     | Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                              |             | Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                       |
|     | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                         | Kota Bekasi | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun                                                                                                                 | 9.000.000.000  | Sub kegiatan ini dianggarkan untuk memfasilitasi Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan (MUI, FKUB, FPK, FKDM dan Organisasi Lainnya) |
| 5   | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                        | Kota Bekasi | Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                       |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                          | Kota Bekasi | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah        |                |                                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                       |
|     | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Bekasi | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 537.200.000    | Sub kegiatan ini dianggarkan untuk memfasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Bekasi                                              |
|     | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Kota Bekasi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                           | 1.375.000.000  | Sub kegiatan ini dianggarkan untuk memfasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Bekasi                            |

(Sumber : Usulan Pemangku Jabatan dan Dokumen Rencana Strategis Teknokratik Bakesbangpol Tahun 2024-2026)

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 merupakan rencana pembangunan jangka menengah keempat dari 4 (empat) tahap RPJM yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Ke-4 tahun 2020-2025 adalah kelanjutan RPJMN ketiga Tahun 2014-2019, dengan arah/isu utama sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025, yaitu: *“Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”*. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2025 dimaksud, Pemerintah telah merumuskan Visi yaitu: *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”*. Untuk mencapai Visi tersebut, terdapat 9 (sembilan) Misi yang diemban dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;
2. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
3. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
4. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
5. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
6. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
7. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
8. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk melaksanakan 9 (sembilan) misi di atas, Pemerintah Pusat menetapkan agenda untuk mendukung misi tersebut. Agenda tersebut antara lain:

Agenda I : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

- berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata;
- Agenda II : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang;
- Agenda III : Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah;
- Agenda IV : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan;
- Agenda V : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
- Agenda VI : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
- Agenda VII : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Dari ketujuh agenda tersebut, pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terfokus pada agenda ke VII yaitu Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Penegakan pilar demokrasi bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan

rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. Hal ini tertuang di dalam Renstra Kemendagri 2020-2024.

Dalam pelaksanaannya, penegakan pilar demokrasi difokuskan kepada:

1. Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik, khususnya revisi terbatas terhadap UU Nomor 15 Tahun 2011 pengganti UU Nomor 22 Tahun 2007 menjadi tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi;
3. Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil;
4. Indeks Kebebasan Sipil;
5. Indeks Hak-Hak Politik;
6. Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Pemda dan para pemangku kepentingan;
7. Persentase forum dialog publik yang efektif; serta
8. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI).

Kebijakan yang telah digariskan Menteri Dalam Negeri RI melalui Renstra Kemendagri tersebut kemudian dijabarkan lebih teknis oleh Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karenanya, untuk melihat arah kebijakan nasional pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melakukan telaahan kebijakan Direktorat Jenderal Kesbangpol Kemendagri RI dan kebijakan Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat. Telaahan bermaksud untuk melakukan analisa kemampuan Badan Kesbangpol Kota Bekasi di dalam menjawab tantangan isu di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkembang di tataran pusat maupun provinsi. Telaahan ini juga disertai analisa faktor penghambat dan pendorong pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi dihubungkan dengan kebijakan prioritas yang dikeluarkan Ditjen Kesbangpol dan Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat. Telaahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kota Bekasi Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dalam Pelayanan**

| No  | Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah Kemendagri dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat                     | Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kota Bekasi                                                                                                                                                                                                                                                   | Sebagai Faktor                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penghambat                                                                                                                                            | Pendorong                                                                                                                                                                                                                    |
| (1) | (2)                                                                                                            | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (5)                                                                                                                                                   | (6)                                                                                                                                                                                                                          |
| 1   | <b>Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 1)Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Data base keberadaan/domisili organisasi kemasyarakatan di Kota Bekasi belum terkonsolidasi dengan baik;</li><li>• Anggota-anggota organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan tidak melakukan transfer pengetahuan kepada anggotanya</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Anggota organisasi kemasyarakatan kurang disiplin di dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Bekasi.</li></ul>                         |
|     | <b>Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Politik Dalam Negeri</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 2)Persentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu                            | Kurangnya pendidikan dasar bagi aparatur Kesbangpol terkait metode penyusunan laporan pemantauan perkembangan politik yang sedang berkembang                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya penjelasan mengenai indikator-indikator politik yang harus dilaporkan dari objek pantauan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk memberikan laporan pantauan terkait perkembangan politik yang terjadi di Kota Bekasi</li></ul>              |
|     | 3)Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan                                                      | Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Partai Politik terkait informasi tata cara pemberian Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Keterlambatan Partai Politik di dalam menyelesaikan SPJ Bantuan Keuangan</li></ul>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang berhak menerima Bantuan Keuangan</li></ul> |
|     | <b>Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Kewaspadaan Nasional</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 4)Jumlah Pemantauan Situasi Daerah                                                                             | Adanya instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam melakukan pemantauan situasi daerah.                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya sarana dan prasarana serta aparatur di dalam menunjang kegiatan pemantauan</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan pemantauan terkait situasi dan eskalasi yang terjadi di daerah</li></ul>                          |
|     | 5)Jumlah aparatur Pemda yang mendapatkan pendidikan dan                                                        | Minimnya aparatur Kesbangpol Kota Bekasi yang mendapatkan Diklat                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya anggaran yang mendukung adanya Diklat</li></ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi</li></ul>                                                                                                         |

| No  | Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah Kemendagri dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat                                                     | Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kota Bekasi                                                                                                                                  | Sebagai Faktor                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | Penghambat                                                                                                                                      | Pendorong                                                                                                                                                                                                            |
| (1) | (2)                                                                                                                                            | (4)                                                                                                                                                                                   | (5)                                                                                                                                             | (6)                                                                                                                                                                                                                  |
|     | pelatihan bidang Kewaspadaan Nasional                                                                                                          | mengenai Kewaspadaan Nasional                                                                                                                                                         | Kewaspadaan Nasional                                                                                                                            | untuk melakukan pembinaan kepada aparaturnya terkait Kewaspadaan Nasional                                                                                                                                            |
|     | Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1)Jumlah kerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | Belum tersedianya ketentuan/ metode baku terkait materi dan pola kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam membangun wawasan kebangsaan di masyarakat | • Rendahnya keinginan masyarakat di dalam mengkaji wawasan kebangsaan dan ideologi Negara, terutama dari kalangan pemuda                        | • Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk menjalin kerjasama yang intensif dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka membangun ideologi dan wawasan kebangsaan di masyarakat    |
|     | 2)Jumlah penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparaturnya pemerintah               | Belum tersedianya materi/ bahan ajar baku yang membahas nilai-nilai kebangsaan bagi pemuda, perempuan dan aparaturnya pemerintah                                                      | • Rendahnya keinginan pemuda, perempuan dan aparaturnya pemerintah di dalam mengkaji nilai-nilai kebangsaan demi terciptanya wawasan kebangsaan | • Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparaturnya pemerintahan |
| 2   | Indikator Kinerja Bakesbangpol Prov. Jawa Barat: Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Sasaran Jangka Menengah:<br>3)Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu;                                                                     | Adanya instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Pemilihan Umum                                                     | • Kesbangpol Kota Bekasi tidak memiliki payung hukum untuk melakukan sosialisasi.                                                               | • Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk menjamin ketertiban dan keamanan selama proses Pemilu                                                                                     |
|     | 4)Tingkat Penyelenggaraan Pendidikan Politik;                                                                                                  | Adanya perbedaan pemahaman dan cara pandang dari sebagian aktifis organisasi yang berada di Kota Bekasi di dalam melakukan pemaknaan proses politik                                   | • Data domisili dari organisasi kemasyarakatan atau perwakilan kelompok lainnya sering berubah tanpa ada pemberitahuan                          | • Kesbangpol Kota Bekasi, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk memperkuat kelembagaan demokrasi yang ada di Kota Bekasi serta meningkatkan pemahaman politik masyarakat Kota Bekasi                         |
|     | 5)Tingkat Peran Serta Masyarakat                                                                                                               | Belum ada payung hukum yang secara                                                                                                                                                    | • Terdapat oknum dari Orkemas atau                                                                                                              | • Kesbangpol Kota Bekasi, berdasarkan                                                                                                                                                                                |

| No  | Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah Kemendagri dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat | Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kota Bekasi                                                                              | Sebagai Faktor                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                            |                                                                                                                                   | Penghambat                                                                                                                                                              | Pendorong                                                                                                                                                                              |
| (1) | (2)                                                                                        | (4)                                                                                                                               | (5)                                                                                                                                                                     | (6)                                                                                                                                                                                    |
|     | Madani (Civil Society) dalam Pembangunan Politik;                                          | terperinci mengatur keterlibatan masyarakat beserta batasannya di dalam Pembangunan Politik di Kota Bekasi                        | aktifis di Kota Bekasi yang menggunakan dalil peran serta masyarakat atau keterbukaan publik melakukan tindakan penyidikan yang bukan wewenang dari organisasi tersebut | tupoksi mempunyai kewajiban untuk memperkuat keterlibatan masyarakat di dalam Pembangunan Politik di Kota Bekasi dengan cara menanamkan nilai-nilai politik yang santun dan beretika   |
|     | 6)Tingkat Ideologi dan Wawasan Kebangsaan                                                  | Pemerintah Pusat maupun Provinsi belum menyediakan modul/ garis-garis besar Wawasan Kebangsaan terkait kondisi Indonesia saat ini | • Kurangnya keinginan dari masyarakat untuk memahami Wawasan Kebangsaan, terutama dari kalangan remaja/ pemuda                                                          | • Kesbangpol Kota Bekasi, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai dan ideologi Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat, terutama kalangan masyarakat pemuda/remaja |

3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol

Oleh karena itu, tujuan dan sasaran dari Badan Kesbangpol dalam periode 2024-2026 harus disesuaikan dengan misi dan program prioritas yang dimaksud sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Adapun tujuan Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
- 2. Merawat Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dengan mengembangkan aspek demokrasi, kebangsaan dan kerukunan serta keberagaman;

Adapun sasaran Sasaran adalah prediksi hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi adalah:

- 1) Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
- 2) Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi;

Dari sasaran tersebut kemudian ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja tujuan.

Sasaran-sasaran yang ada kemudian dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program anggaran/ kegiatan. Untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025, Badan Kesbangpol Kota Bekasi menyediakan beberapa program, yaitu:

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Program ini diukur dengan menggunakan Persentase Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Persentase Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Persentase Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Persentase Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

**2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.**

Program ini diukur dengan menggunakan indikator Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

**3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.** Program ini diukur dengan menggunakan indikator Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah;

**4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.**

Program ini diukur dengan menggunakan indikator Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;

**5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.** Program ini diukur dengan menggunakan indikator Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

**6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.** Program ini diukur dengan menggunakan indikator Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan prioritas arah pembangunan daerah, Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan perencanaan program dan kegiatan berdasarkan Renstra SKPD. Pada tahun 2025 ini Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan penguatan Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan serta penguatan fungsi deteksi dini agar tidak menimbulkan konflik SARA di masyarakat. Badan Kesbangpol juga

melakukan pendidikan politik ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Bekasi serta memberikan pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan Kota Bekasi. Untuk menjaga kantrantibmas dan menekan angka kerawanan sosial di Kota Bekasi, Badan Kesbangpol bekerja sama dengan instansi terkait melakukan giat deteksi dini, kewaspadaan dini masyarakat dan pemantauan kondisifitas wilayah untuk menciptakan lingkungan yang aman secara rutin.

Dalam mendukung upaya yang telah disebutkan di atas, Badan Kesbangpol menyiapkan pembiayaan upaya tersebut dalam wujud rincian program dan kegiatan Badan Kesbangpol yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Rincian tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Belanja Langsung Non Urusan**

**a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan serta ketentuan yang berlaku. Hasil yang didapat adalah meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

**- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 laporan yang mencakup (Renstra, Proker, Renja, RKT, LKPJ dan LKIP). Hasil yang didapat adalah meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

**2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.454.513.000. Dengan target indikator sebanyak 1026 Orang/bulan, adapun keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya Pembayaran gaji, tunjangan dan premi BPJS ASN.

**- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 16 laporan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya sistem pelaporan keuangan SKPD.

**3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

**- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana apratur sebanyak 52 Paket untuk 52 Orang. Hasil yang didapat adalah meningkatnya sarana dan prasarana serta kapasitas dan sumber daya aparatur. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

**- Pendidikan dan Pelatihan Formal**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal aparatur sebanyak 12 orang selama 12 bulan. Hasil yang didapat adalah optimalisasi kinerja aparatur. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

**- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bakesbangpol dengan target sebanyak 52 Orang. Hasil yang didapat adalah peningkatan kompetensi kinerja aparatur terhadap implementasi Peraturan Peundang-Undangan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

**4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**- Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya layanan alat tulis kantor sebanyak 3 Paket. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12

bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya layanan cetakan dan penggandaan sebanyak 1 Paket. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target indikator sebanyak 2 Dokumen. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Fasilitasi Kunjungan Tamu**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan fasilitasi Kunjungan tamu pada OPD dengan target indikator sebanyak 12 Laporan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya fasilitasi terhadap kunjungan Tamu di Perangkat Daerah selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah serta makanan dan minuman Rapat sebanyak 12 Laporan. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 Bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 dengan keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah penataan arsip pada

Badan Kesbangpol sebanyak 12 Dokumen. Hasil yang didapat adalah terfasilitasinya penatausahaan Arsip pada OPD selama 12 Bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

**5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000 dengan Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sejumlah 23 Unit. Hasil yang didapat adalah optimalisasi kinerja OPD. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

**6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 516.007.760. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk dengan target capaian sebanyak 12 Laporan. Hasil yang didapat adalah optimalisasi administrasi perkantoran dengan baik. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

**7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 400.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 22 unit yang terdiri dari 9 unit roda empat dan 13 unit roda dua. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kendaran operasional dinas. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

**- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan Mesin OPD sebanyak 25 Unit untuk 12 Bulan. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

Peralatam dan Mesin OPD. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

**2. Belanja Langsung Urusan**

**a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

**1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

**- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.** Dengan

indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dan target dari Sub Kegitan ini yaitu 200 Orang.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 896.130.000, Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pembinaan Bela Negara di Kota Bekasi. Sasaran dari kegiatan ini pelajar SMA/SMK sederajat se-Kota Bekasi. Model pembinaan dengan melaksanakan pendidikan kesemaptaan di Rindam Siliwangi.
- Pembinaan Pembentukan Karakter Kebangsaan. Sasaran dari kegiatan ini pelajar SMA/SMK sederajat se-Kota Bekasi dengan metode sosialisasi kepada Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan/LSM.

**- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.** Dengan indikator Sub

Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dan target dari Sub Kegitan ini yaitu 354 Orang.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 580.940.500 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Konsepsi Dasar Kebangsaan dengan sasaran peserta kegiatan dari kalangan remaja (pelajar) di Kota Bekasi.

- Peningkatan Kompetensi Pembauran Kebangsaan dengan sasaran peserta kegiatan dari kalangan forum Pembauran Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Bekasi.
  - Pemantapan Ideolog Bangsa dan Nilai-Nilai Pancasila dengan sasaran peserta berasal dari pelajar dan Organisasi Kepemudaan, Orkemas/LSM.
  - Pusat Pelatihan Wawasan Kebangsaan dengan sasaran peserta dari berbagai elemen Masyarakat seperti Organisasi Kepemudaan dan Ormas/LSM.
- **Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka dan target dari Sub Kegiatan ini yaitu 2 Dokumen.
- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 181.762.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
    - Untuk mengembangkan karakter dan keterampilan anggota, seperti kepemimpinan, kerjasama tim, ketahanan fisik, dan keterampilan hidup. Ini penting untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.
    - Pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur bangsa, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. Ini penting untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.
- **Pembentukan Paskibraka.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paskibraka dan target dari Sub Kegiatan ini yaitu 52 Orang.
- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.153.737.300 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
    - Melakukan tahapan seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRAKA) Kota Bekasi.
    - Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022, Paskibraka tidak hanya disiapkan untuk menaikkan dan menurunkan Bendera Pusaka pada peringatan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Adapun hasil yang diharapkan dari berbagai kegiatan yang dianggarkan adalah wawasan kebangsaan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun bangsa yang kuat, demokratis, dan berdaya saing.

**b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

**1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**

- **Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 12 Dokumen.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.479.773.200  
Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan fasilitasi partai politik yang mendapat bantuan keuangan yang mendapat kursi di DPRD Kota Bekasi.

Adapun hasil yang didapat dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan bagi partai politik di Kota Bekasi disesuaikan perolehan suara sah dari partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

- **Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan**

**Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 1504 Orang.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 750.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pembinaan Manajemen Partai Politik. Adapun Hasil yang didapat adalah tertib administrasi dalam pertanggungjawaban bantuan keuangan dan hibah bagi Parpol dan Ormas di Kota Bekasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah Pengurus Partai Politik di Kota Bekasi.
- Pembinaan pendidikan politik di Kota Bekasi. Kegiatan ini direncanakan tersebar se-Kota Bekasi dengan pelaksanaan pendidikan politik secara *on the spot* di sekolah-sekolah. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa SMA/SMK sederajat.

Adapun hasil yang didapat dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kota Bekasi, termasuk pemahaman tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga, serta pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini penting untuk membangun masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab dalam pembangunan daerah.

**c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

**1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

- **Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 51 Dokumen.

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.000.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini berupa Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat Bantuan Dana Hibah. Adapun hasil yang didapat adalah terfasilitasinya hibah sebanyak 51 Ormas/LSM di Kota Bekasi.
  - **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 400 Orang.
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 800.000.000. Dilihat dari jumlah Organisasi Kemasyarakatan/LSM yang begitu kompleks dari berbagai bidang kegiatan, sudah kewajiban pemerintah daerah melalui Bakesbangpol melakukan penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan Organisasi Kemasyarakatan berperanserta dalam Pembangunan di Kota Bekasi. Hasil yang didapat dengan dilaksanakan kegiatan ini adalah memastikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, Organisasi Kemasyarakatan dapat memberikan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.
- d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**
- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**
  - **Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 1900 Orang.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.400.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan fasilitasi pencegahan narkoba sebanyak 2 kegiatan. Kegiatan pertama dengan melaksanakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) bekerja sama dengan unsur stakeholder terkait, dan pelaksanaan kedua dengan memberikan Pembinaan Sosialisasi Bahaya Narkoba (P4GN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini menetapkan bahwa pembinaan dan sosialisasi bahaya narkoba merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi narkoba khususnya di Kota Bekasi. Adapun hasil yang didapat adalah memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat akan bahaya narkoba.
- Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kerukunan beragama dengan tema sinergitas pemerintah daerah dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat di setiap kecamatan dengan berpedoman kepada peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 perihal dengan pembinaan penyelenggaraan kerukunan beragama di daerah. Adapun hasil yang didapat adalah membangun sinergitas antara pemerintah daerah bersama dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bekasi.

**e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

**1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**

- **Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang

Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 250 Orang.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 845.200.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Sosialisasi pengawasan Orang Asing. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah tertibnya administrasi orang asing di Kota Bekasi.
- Pelatihan dasar Intelejen Kasie Trantib Kecamatan dan Kelurahan. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan Kantrantibmas secara rutin di Kota Bekasi.
- Pembinaan anggota FKDM tingkat Kecamatan. Kegiatan ini memiliki kelompok sasaran yang berasal dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kota dan Kecamatan. FKDM merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah Permendagri Nomor 46 Tahun 2019. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan FKDM sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah yang mempunyai tugas utama yaitu menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban melalui menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dalam bentuk tindakan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif.
- **Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan

antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 12 Laporan.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 537.200.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Laporan Hasil Kewaspadaan Dini Daerah. Adapun hasil yang didapat yaitu fasilitasi penyelenggaraan Tim kewaspadaan dini daerah selama 12 Bulan di Kota Bekasi. Fokus kegiatan ini adalah melakukan deteksi dini dalam upaya membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko konflik, mengurangi dampak konflik, dan memfasilitasi pemulihan pasca-konflik.

- **Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 12 Dokumen.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.455.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota selama 12 Bulan. Sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, maka dengan mengacu ketentuan tersebut Badan Kesbangpol memfasilitasi melalui sub kegiatan ini.

Semua program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Kesesuaian ini sangat penting karena memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan tidak hanya mendukung visi dan misi pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Dengan kata lain, setiap langkah yang diambil oleh Badan Kesbangpol harus terintegrasi dengan rencana strategis yang lebih besar, sehingga menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi. Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dianggarkan secara terperinci. Proses penganggaran yang cermat ini bertujuan untuk menjamin bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan dengan efisien dan efektif. Anggaran yang disusun mencerminkan prioritas dan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

Keterkaitan antara dukungan program, kegiatan, dan sub kegiatan sangat penting dalam mencapai sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setiap elemen dalam struktur ini saling mendukung dan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan Badan Kesbangpol, yang mencakup peningkatan akuntabilitas pelayanan publik dan pemeliharaan persatuan serta kesatuan masyarakat di Kota Bekasi. Peningkatan akuntabilitas pelayanan publik berarti Badan Kesbangpol berkomitmen untuk memberikan layanan yang transparan, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat. Hal ini mencakup pengembangan sistem pelaporan yang baik, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta penyediaan layanan yang memenuhi harapan masyarakat. Sementara itu, merawat persatuan dan kesatuan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran dalam pembangunan. Ini dapat dicapai melalui program-program yang mendorong dialog antar kelompok, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, melalui pelaksanaan yang terintegrasi, Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di masyarakat, sehingga menciptakan Kota Bekasi yang lebih baik dan berdaya saing.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2025**

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol adalah urusan Pemerintahan Umum, yang merupakan urusan wajib. Kebersinambungan Rencana Kerja Kesbangpol dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilihat yaitu dengan adanya Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan pada program-program Badan Kesbangpol.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah (Permendagri No. 54 Tahun 2010).

Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol dan dokumen pembangunan lainnya. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010). Dalam komponen kegiatan ini, perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Program dan Kegiatan dalam periode tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol merupakan kegiatan yang menjadi wewenang Badan Kesbangpol dalam rangka mendukung terwujudnya Misi Kota Bekasi melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dibagi berdasarkan 2 (dua) bagian besar, yaitu Program Prioritas dan Program Rutin (Program yang ada di hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah).

Program Prioritas Badan Kesbangpol adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;

Jumlah Program yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol tahun 2025 berjumlah 6 (Enam) program yang dijabarkan dalam 12 (Dua belas) kegiatan dan 29 (Dua puluh sembilan) Sub Kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan berlokasi di Kota Bekasi dan Luar Kota Bekasi dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Bekasi.

Rumusan program dan kegiatan Badan Kesbangpol seluruhnya telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk pagu indikatif masih terdapat beberapa perbedaan (dan perubahan) karena pagu anggaran yang terdapat pada Rancangan RKPD masih bersifat tentatif, banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian pagu anggaran di tingkat TAPD, dan masih akan disesuaikan dengan kebutuhan akan ketercapaian indikator dan target kinerja kegiatan-kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan RENJA-PD berpedoman pada RENSTRA Badan Kesbangpol Kota Bekasi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RENJA-PD bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. RENJA-PD yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Rencana

Strategis (RENSTRA) teknokratik Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dengan program dan kegiatan serta pagu indikatif mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) teknokratik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1. berikut.

Tabel 4. 1 Rancangan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025

| Kode |   |   |      |   |  | KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021                                                 | KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023                                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                              |                  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                                        |                                               |                                                                |                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                      | Kelompok Sasaran                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                   |        |
|------|---|---|------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
|      |   |   |      |   |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                  | Target Usulan 2025 (Renstra 2024-2026) | Target Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | Pagu Indikatif Tahun 2025 (Renstra 2024-2026) | Pagu Indikatif Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | Lokasi                                                                                                                             | Sumber Dana                                                          |                                                |                                   | Prioritas                         |        |
|      |   |   |      |   |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                  |                                        |                                                        |                                               |                                                                |                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                      |                                                |                                   | Nasional                          | Daerah |
| 1    |   |   |      |   |  | 2                                                                                     | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                | 5                                      | 5                                                      | 6                                             | 7                                                              | 8                                                               | 9                                                                                                                                  | 10                                                                   | 11                                             | 12                                | 15                                |        |
| 8    |   |   |      |   |  | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                  |                                        |                                                        |                                               |                                                                |                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                      |                                                |                                   |                                   |        |
| 8    | 1 |   |      |   |  | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                  |                                        | 39.402.241.540                                         | 44.917.630.760                                | 46.615.263.762                                                 |                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                      |                                                |                                   |                                   |        |
| 8    | 1 | 1 |      |   |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                                                                                | 100 %            | 100 %                                  | 11.564.671.740                                         | 12.017.660.960                                | 13.535.520.762                                                 |                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                      |                                                |                                   |                                   |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.01 |   |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                 | 100 %            | 100 %                                  | 40.000.000                                             | 25.000.000                                    | 175.000.001                                                    |                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                      |                                                |                                   |                                   |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.01 | 1 |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen        | 1 Dokumen                              | 150.000.000                                            | 150.000.000                                   | 150.000.000                                                    |                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                      |                                                |                                   |                                   |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.01 | 6 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan        | 1 Laporan                              | 40.000.000                                             | 25.000.000                                    | 25.000.001                                                     | Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                       | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi      | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.02 |   |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                   | 100 %            | 100 %                                  | 8.904.620.000                                          | 9.113.062.000                                 | 10.469.513.000                                                 |                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                      |                                                |                                   |                                   |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.02 | 1 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 1134 Orang/bulan | 1064 Orang/bulan                       | 8.894.620.000                                          | 9.098.062.000                                 | 10.454.513.000                                                 | Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi      | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.02 | 7 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan                                                                 | 18 Laporan       | 16 Laporan                             | 10.000.000                                             | 15.000.000                                    | 15.000.000                                                     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                       | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi                  | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi      | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |        |

| Kode |   |   |      |    |  | KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021                         | KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                           |           | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                 |                                                        |                                        |                                                        |                                               |                                                                |                                                                      |                                                | Kelompok Sasaran             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |           |        |
|------|---|---|------|----|--|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|--------|
|      |   |   |      |    |  |                                                               |                                                               |                                                                                     |           | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Usulan 2025 (Renstra 2024-2026) | Target Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | Pagu Indikatif Tahun 2025 (Renstra 2024-2026) | Pagu Indikatif Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025      | Lokasi                                         |                              |                                   | Sumber Dana | Prioritas |        |
|      |   |   |      |    |  |                                                               |                                                               |                                                                                     |           |                                                        |                                                        |                                        |                                                        |                                               |                                                                |                                                                      |                                                |                              |                                   |             | Nasional  | Daerah |
| 1    |   |   |      |    |  | 2                                                             | 3                                                             | 4                                                                                   | 5         | 5                                                      | 5                                                      | 6                                      | 7                                                      | 8                                             | 9                                                              | 10                                                                   | 11                                             | 12                           | 15                                |             |           |        |
|      |   |   |      |    |  |                                                               |                                                               | Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD                                        |           |                                                        |                                                        |                                        |                                                        | Semua Kelurahan                               |                                                                | Pelayanan Publik                                                     |                                                |                              |                                   |             |           |        |
|      |   |   |      |    |  |                                                               |                                                               | Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 100 %     | 100 %                                                  |                                                        |                                        |                                                        |                                               |                                                                |                                                                      |                                                |                              |                                   |             |           |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.05 |    |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                | 100 %     | 100 %                                                  | 330.000.000                                            | 490.000.000                            | 500.000.000                                            |                                               |                                                                |                                                                      |                                                |                              |                                   |             |           |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.05 | 2  |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan           | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 52 Paket  | 50 Paket                                               | 150.000.000                                            | 200.000.000                            | 200.000.000                                            | Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |             |           |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.05 | 9  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12 Orang  | 10 Orang                                               | 30.000.000                                             | 40.000.000                             | 50.000.000                                             | Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |             |           |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.05 | 11 |  | Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang        | Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang  | 52 Orang  | 52 Orang                                               | 150.000.000                                            | 250.000.000                            | 250.000.000                                            | Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |             |           |        |
|      |   |   |      |    |  |                                                               |                                                               | Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 100 %     | 100 %                                                  |                                                        |                                        |                                                        |                                               |                                                                |                                                                      |                                                |                              |                                   |             |           |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.06 |    |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | 100 %     | 100 %                                                  | 1.000.000.000                                          | 1.075.000.000                          | 1.075.000.000                                          |                                               |                                                                |                                                                      |                                                |                              |                                   |             |           |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.06 | 4  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 3 Paket   | 3 Paket                                                | 350.000.000                                            | 350.000.000                            | 350.000.000                                            | Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |             |           |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.06 | 5  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 1 Paket   | 12 Paket                                               | 75.000.000                                             | 75.000.000                             | 75.000.000                                             | Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |             |           |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.06 | 6  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 2 Dokumen | 2 Dokumen                                              | 75.000.000                                             | 50.000.000                             | 50.000.000                                             | Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |             |           |        |

| Kode |    |    |      |    | KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021                                                                               | KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023                                                                        | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                              |             |            | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                 |                                                        |                                        |                                                        |                                               |                                                                      | Kelompok Sasaran                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                 |        |             |           |        |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                        |             |            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Usulan 2025 (Renstra 2024-2026) | Target Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | Pagu Indikatif Tahun 2025 (Renstra 2024-2026) | Pagu Indikatif Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025       |                                                |                                   | Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                        |             |            |                                                        |                                                        |                                        |                                                        |                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                 |        |             | Nasional  | Daerah |
| 1    |    |    |      |    | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5           | 5          | 5                                                      | 6                                                      | 7                                      | 8                                                      | 9                                             | 10                                                                   | 11                                             | 12                                | 15                                                              |        |             |           |        |
| 8    | 1  | 1  | 2.06 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan  | 12 Laporan | 150.000.000                                            | 150.000.000                                            | 150.000.000                            | Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi      | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                               |        |             |           |        |
| 8    | 1  | 1  | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan  | 12 Laporan | 250.000.000                                            | 350.000.000                                            | 350.000.000                            | Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi      | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                               |        |             |           |        |
| 8    | 1  | 1  | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 250 Dokumen | 12 Dokumen | 100.000.000                                            | 100.000.000                                            | 100.000.000                            | Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi      | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                               |        |             |           |        |
| 8    | 01 | 01 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | 100 %       | 100 %      | 300.000.000                                            | 300.000.000                                            | 300.000.001                            |                                                        |                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                 |        |             |           |        |
| 8    | 01 | 01 | 2.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 34 Unit     | 23 Unit    | 300.000.000                                            | 300.000.000                                            | 300.000.001                            | Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi      | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                               |        |             |           |        |
| 8    | 1  | 1  | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | 100 %       | 100 %      | 550.051.740                                            | 514.598.960                                            | 516.007.760                            |                                                        |                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                 |        |             |           |        |
| 8    | 1  | 1  | 2.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan  | 12 Laporan | 550.051.740                                            | 514.598.960                                            | 516.007.760                            | Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi      | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                               |        |             |           |        |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                                     | Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                 | 100 %       | 100 %      |                                                        |                                                        |                                        |                                                        |                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                 |        |             |           |        |
| 8    | 1  | 1  | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 %       | 100 %      | 440.000.000                                            | 500.000.000                                            | 500.000.000                            |                                                        |                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                 |        |             |           |        |
| 8    | 1  | 1  | 2.09 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 22 Unit     | 22 Unit    | 340.000.000                                            | 400.000.000                                            | 400.000.000                            | Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi      | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                               |        |             |           |        |

| Kode |   |   |      |   |  | KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021                                                                                                                      | KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023                                                                                                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                              |           | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                                        |                                               |                                                                |                                                                 |                                    |                                                                      |                                                | Kelompok Sasaran             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |
|------|---|---|------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
|      |   |   |      |   |  | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                     | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |           | Target Usulan 2025 (Renstra 2024-2026) | Target Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | Pagu Indikatif Tahun 2025 (Renstra 2024-2026) | Pagu Indikatif Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | Lokasi                             | Sumber Dana                                                          | Prioritas                                      |                              |                                   |        |
|      |   |   |      |   |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |           |                                        |                                                        |                                               |                                                                |                                                                 |                                    |                                                                      | Nasional                                       |                              |                                   | Daerah |
| 1    |   |   |      |   |  | 2                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                      | 5         | 5                                      | 5                                                      | 6                                             | 7                                                              | 8                                                               | 9                                  | 10                                                                   | 11                                             | 12                           | 15                                |        |
| 8    | 1 | 1 | 2.09 | 6 |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                     | 25 Unit   | 25 Unit                                | 100.000.000                                            | 100.000.000                                   | 100.000.000                                                    | Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Badan Kesbangpol Kota Bekasi | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |        |
| 8    | 1 | 2 |      |   |  | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                               | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                 | Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                      | 100 %     | 100 %                                  | 2.812.569.800                                          | 2.812.569.800                                 | 2.812.569.800                                                  |                                                                 |                                    |                                                                      |                                                |                              |                                   |        |
| 8    | 1 | 2 | 2.01 |   |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                      | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                          | 200 Orang | 200 Orang                              | 896.130.000                                            | 896.130.000                                   | 896.130.000                                                    |                                                                 |                                    |                                                                      |                                                |                              |                                   |        |
|      |   |   |      |   |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                          | 353 Orang | 354 Orang                              | 580.940.500                                            | 580.940.500                                   | 580.940.500                                                    |                                                                 |                                    |                                                                      |                                                |                              |                                   |        |
|      |   |   |      |   |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka                                                                                                                   | 1 Dokumen | 2 Dokumen                              | 181.762.000                                            | 181.762.000                                   | 181.762.000                                                    |                                                                 |                                    |                                                                      |                                                |                              |                                   |        |
|      |   |   |      |   |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka                                                                                                                                           | 51 Orang  | 52 Orang                               | 1.153.737.300                                          | 1.153.737.300                                 | 1.153.737.300                                                  |                                                                 |                                    |                                                                      |                                                |                              |                                   |        |
| 8    | 1 | 2 | 2.01 | 3 |  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 200 Orang | 200 Orang                              | 896.130.000                                            | 896.130.000                                   | 896.130.000                                                    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Pelajar dan Masyarakat       | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |        |
| 8    | 1 | 2 | 2.01 | 4 |  |                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan           | 353 Orang | 354 Orang                              | 580.940.500                                            | 580.940.500                                   | 580.940.500                                                    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Pelajar dan Masyarakat       | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |        |
| 8    | 1 | 2 | 2.01 | 7 |  |                                                                                                                                                            | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                              | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka                                                                                           | 1 Dokumen | 2 Dokumen                              | 181.762.000                                            | 181.762.000                                   | 181.762.000                                                    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Pelajar dan Masyarakat       | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |        |

| Kode |   |   |      |   | KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021                                                                                                                                                                                                                           | KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       |            | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                 |                                                        |                                        |                                                        |                                                  |                                                                | Kelompok Sasaran                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab              |                                                                 |                                   |             |           |        |
|------|---|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|--------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Usulan 2025 (Renstra 2024-2026) | Target Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | Pagu Indikatif Tahun 2025 (Renstra 2024-2026)    | Pagu Indikatif Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 |                                                                      |                                                | Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | Lokasi                            | Sumber Dana | Prioritas |        |
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                        |                                                        |                                        |                                                        |                                                  |                                                                |                                                                      |                                                |                                                                 |                                   |             | Nasional  | Daerah |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5          | 5                                                      | 5                                                      | 6                                      | 7                                                      | 8                                                | 9                                                              | 10                                                                   | 11                                             | 12                                                              | 15                                |             |           |        |
| 8    | 1 | 2 | 2.01 | 8 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                               | 51 Orang   | 52 Orang                                               | 1.153.737.300                                          | 1.153.737.300                          | 1.153.737.300                                          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL                             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Pelajar dan Masyarakat                                          | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |             |           |        |
| 8    | 1 | 3 |      |   | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                          | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                          | Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | 100%       | 100%                                                   | 11.750.000.000                                         | 15.750.000.000                         | 15.229.773.200                                         |                                                  |                                                                |                                                                      |                                                |                                                                 |                                   |             |           |        |
| 8    | 1 | 3 | 2.01 |   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                 | 12 Dokumen | 12 Dokumen                                             | 11.000.000.000                                         | 15.000.000.000                         | 14.479.773.200                                         |                                                  |                                                                |                                                                      |                                                |                                                                 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |             |           |        |
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                  | 1135 Orang | 1504 Orang                                             | 750.000.000                                            | 750.000.000                            | 750.000.000                                            |                                                  |                                                                |                                                                      |                                                | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                               |                                   |             |           |        |
| 8    | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah  | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah  | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 12 Dokumen | 12 Dokumen                                             | 11.000.000.000                                         | 15.000.000.000                         | 14.479.773.200                                         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat      | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |             |           |        |
| 8    | 1 | 3 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan                                                                                                                                         | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas                                                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,                                                                                                                                                               | 1135 Orang | 1504 Orang                                             | 750.000.000                                            | 750.000.000                            | 750.000.000                                            | Kota Bekasi, Semua Kecamatan,                    | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL                             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi                  | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat      | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |             |           |        |

| Kode |   |   |      |   |                                                                                                                    | KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021                                                                                                                     | KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023                                                                                                               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                          |            | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                 |                                                        |                                        |                                                        |                                               |                                                                |                                                                                | Kelompok Sasaran                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                    |                                   |             |           |        |
|------|---|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|--------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Usulan 2025 (Renstra 2024-2026) | Target Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | Pagu Indikatif Tahun 2025 (Renstra 2024-2026) | Pagu Indikatif Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025                |                                                |                                                      | Lokasi                            | Sumber Dana | Prioritas |        |
|      |   |   |      |   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |            |                                                        |                                                        |                                        |                                                        |                                               |                                                                |                                                                                |                                                |                                                      |                                   |             | Nasional  | Daerah |
| 1    |   |   |      |   |                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                  | 5          | 5                                                      | 5                                                      | 6                                      | 7                                                      | 8                                             | 9                                                              | 10                                                                             | 11                                             | 12                                                   | 15                                |             |           |        |
|      |   |   |      |   |                                                                                                                    | Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                      | Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah           | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                        |            |                                                        |                                                        |                                        |                                                        | Semua Kelurahan                               |                                                                | Pelayanan Publik                                                               |                                                |                                                      |                                   |             |           |        |
| 8    | 1 | 4 |      |   |                                                                                                                    | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                             | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                              | Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                   | 100 %      | 100 %                                                  | 9.900.000.000                                          | 9.800.000.000                          | 9.800.000.000                                          |                                               |                                                                |                                                                                |                                                |                                                      |                                   |             |           |        |
| 8    | 1 | 4 | 2.01 |   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                        | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 32 Dokumen                                                                                                                                                                         | 51 Dokumen | 9.500.000.000                                          | 9.000.000.000                                          | 9.000.000.000                          |                                                        |                                               |                                                                |                                                                                |                                                |                                                      |                                   |             |           |        |
|      |   |   |      |   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah     | 400 Orang                                                                                                                                                                          | 400 Orang  | 400.000.000                                            | 800.000.000                                            | 800.000.000                            |                                                        |                                               |                                                                |                                                                                |                                                |                                                      |                                   |             |           |        |
| 8    | 1 | 4 | 2.01 | 1 |                                                                                                                    | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun         | 32 Dokumen | 51 Dokumen                                             | 9.500.000.000                                          | 9.000.000.000                          | 9.000.000.000                                          | Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   | Memperkuat Stabilitas Prioritas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |             |           |        |
| 8    | 1 | 4 | 2.01 | 3 |                                                                                                                    | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah    | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 400 Orang  | 400 Orang                                              | 400.000.000                                            | 800.000.000                            | 800.000.000                                            | Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL                             | Memperkuat Stabilitas Prioritas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |             |           |        |
| 8    | 1 | 5 |      |   |                                                                                                                    | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                   | Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                       | 100 %      | 100 %                                                  | 1.000.000.000                                          | 1.200.000.000                          | 1.400.000.000                                          |                                               |                                                                |                                                                                |                                                |                                                      |                                   |             |           |        |
| 8    | 1 | 5 | 2.01 |   |                                                                                                                    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                         | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                          | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,                                                             | 1700 Orang | 1900 Orang                                             | 1.000.000.000                                          | 1.200.000.000                          | 1.400.000.000                                          |                                               |                                                                |                                                                                |                                                |                                                      |                                   |             |           |        |

| Kode |   |   |      |   |  | KEPMENDAGRI NOMOR<br>050-5889 TAHUN 2021                                                                                                                                                    | KEPMENDAGRI<br>NOMOR 900.1.15.5-<br>1317 TAHUN 2023                                                                                                                                         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        |            | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan          |                                                                    |                                                         |                                                                            |                                                                             |                                     | Kelompok Sasaran                                                     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab     |                                                                |                                   |        |
|------|---|---|------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|      |   |   |      |   |  | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Target Usulan<br>2025<br>(Renstra<br>2024-2026) | Target<br>Rancangan Awal<br>Rencana Kerja<br>(RENJA) Tahun<br>2025 | Pagu Indikatif<br>Tahun 2025<br>(Renstra 2024-<br>2026) | Pagu Indikatif<br>Rancangan<br>Awal Rencana<br>Kerja (RENJA)<br>Tahun 2025 | Pagu Indikatif<br>Rancangan<br>Akhir Rencana<br>Kerja (RENJA)<br>Tahun 2025 | Lokasi                              |                                                                      |                                                | Sumber<br>Dana                                                 | Prioritas                         |        |
|      |   |   |      |   |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                            |                                                                             |                                     |                                                                      |                                                |                                                                | Nasional                          | Daerah |
| 1    |   |   |      |   |  | 2                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5          | 5                                               | 5                                                                  | 6                                                       | 7                                                                          | 8                                                                           | 9                                   | 10                                                                   | 11                                             | 12                                                             | 15                                |        |
|      |   |   |      |   |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                                                                                                                                              |            |                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                            |                                                                             |                                     |                                                                      |                                                |                                                                |                                   |        |
| 8    | 1 | 5 | 2.01 | 3 |  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                             | 1700 Orang | 1900 Orang                                      | 1.000.000.000                                                      | 1.200.000.000                                           | 1.400.000.000                                                              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                            | DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Pelajar, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Stakeholder terkait | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |        |
| 8    | 1 | 6 |      |   |  | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                  | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                  | Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah                                                                                                                                                                                                                                      | 100 %      | 100 %                                           | 2.375.000.000                                                      | 3.337.400.000                                           | 3.837.400.000                                                              |                                                                             |                                     |                                                                      |                                                |                                                                |                                   |        |
| 8    | 1 | 6 | 2.01 |   |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                    | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | 300 Orang  | 250 Orang                                       | 350.000.000                                                        | 845.200.000                                             | 845.200.000                                                                |                                                                             |                                     |                                                                      |                                                |                                                                |                                   |        |
|      |   |   |      |   |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan                                      | 650.000.000                                                        | 537.200.000                                             | 537.200.000                                                                |                                                                             |                                     |                                                                      |                                                |                                                                |                                   |        |
|      |   |   |      |   |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | 12 Dokumen | 12 Dokumen                                      | 1.375.000.000                                                      | 1.955.000.000                                           | 2.455.000.000                                                              |                                                                             |                                     |                                                                      |                                                |                                                                |                                   |        |
| 8    | 1 | 6 | 2.01 | 3 |  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,                                                       | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga                                                                                                                          | 300 Orang  | 250 Orang                                       | 350.000.000                                                        | 845.200.000                                             | 845.200.000                                                                | Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi                  | Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya | Stakeholder terkait dan Masyarakat                             | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |        |

| Kode  |   |   |      |   |  | KEPMENDAGRI NOMOR<br>050-5889 TAHUN 2021                                                                                                                                                                                                                                          | KEPMENDAGRI<br>NOMOR 900.1.15.5-<br>1317 TAHUN 2023                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Target Usulan<br>2025<br>(Renstra<br>2024-2026) | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                             |                                                         |                                                                            |                                                                             |                                                  |                                     | Kelompok Sasaran                                                     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab      |                                                                |                                   |  |  |
|-------|---|---|------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|       |   |   |      |   |  | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | Target<br>Rancangan Awal<br>Rencana Kerja<br>(RENJA) Tahun<br>2025 | Pagu Indikatif<br>Tahun 2025<br>(Renstra 2024-<br>2026) | Pagu Indikatif<br>Rancangan<br>Awal Rencana<br>Kerja (RENJA)<br>Tahun 2025 | Pagu Indikatif<br>Rancangan<br>Akhir Rencana<br>Kerja (RENJA)<br>Tahun 2025 | Lokasi                                           | Sumber<br>Dana                      |                                                                      |                                                 | Prioritas                                                      |                                   |  |  |
|       |   |   |      |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                            |                                                                             |                                                  |                                     |                                                                      |                                                 | Nasional                                                       | Daerah                            |  |  |
| 1     |   |   |      |   |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                               | 5                                                                  | 5                                                       | 6                                                                          | 7                                                                           | 8                                                | 9                                   | 10                                                                   | 11                                              | 12                                                             | 15                                |  |  |
|       |   |   |      |   |  | Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                                                                                                                                                | Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                                                                                                                                         | Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                                                                                                                                |                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                            |                                                                             |                                                  |                                     | Pelayanan Publik                                                     |                                                 |                                                                |                                   |  |  |
| 8     | 1 | 6 | 2.01 | 5 |  | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 12 Laporan                                      | 12 Laporan                                                         | 650.000.000                                             | 537.200.000                                                                | 537.200.000                                                                 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan | Forum Bentukan Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |  |  |
| 8     | 1 | 6 | 2.01 | 6 |  | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                           | 12 Dokumen                                      | 12 Dokumen                                                         | 1.375.000.000                                           | 1.955.000.000                                                              | 2.455.000.000                                                               | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan | Forum Bentukan Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |  |  |
| TOTAL |   |   |      |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                    |                                                         | 39.402.241.540                                                             | 44.917.630.760                                                              | 46.615.263.762                                   |                                     |                                                                      |                                                 |                                                                |                                   |  |  |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Penetapan program dan kegiatan yang ada di dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melakukan perumusan Renja, kebijakan yang tertuang di dalam RPD Kota Bekasi dan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi dijadikan rujukan utama di dalam proses penyusunan. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Renja ini adalah prinsip efesiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Inti dari penyusunan Renja ini adalah optimalisasi pencapaian hasil dari upaya Perangkat Daerah per tahun anggaran. Selain itu, Renja mempunyai posisi penting di dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronasi antar kegiatan yang ada di dalam satu program, maupun kegiatan-kegiatan yang berlainan program. Oleh karenanya, untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan *sharing* informasi dari Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah. Melalui penyusunan Renja lah *sharing* informasi itu dapat dilaksanakan.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan terdapat kendala, baik dalam proses pelaksanaan fisik dan anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan kerja. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan yang terlebih dahulu dilakukan proses keselarasan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan.

#### **B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Akhir Badan Kesbangpol merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025. Untuk menyusun Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi ini setiap tahapan perencanaan pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan. Dimulai dari penjaringan usulan yang berasal dari Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan hingga Forum Musrenbang Tingkat Kota Bekasi. Pada setiap tahapan perencanaan yang dijalani, memungkinkan terjadinya kesalahan maupun distorsi maksud atau tujuan dari usulan.

Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama tahun 2025, Badan Kesbangpol Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan Renja ini.

### **C. Rencana Tindak Lanjut**

1. Perlu meningkatkan pemahaman dan penguatan fungsi deteksi dini dari setiap aparatur Badan Kesbangpol. Hal ini diperlukan untuk melakukan analisa kerawanan sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu tahapan preventif maupun rehabilitasi;
2. Perlu meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan rasa solidaritas dan tenggang rasa di masyarakat Kota Bekasi;
3. Aparatur Badan Kesbangpol yang ada saat ini dari sisi kualitas masih kurang, sehingga akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penambahan jumlah pegawai;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam proses pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bekasi,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BEKASI



**NESAN SUJANA/S.T., M.T. CGCAE**  
Pembina Tk. I / (IV.b)  
NIP. 19740708 200212 1 007

**USULAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO                       | JENIS BELANJA                                                                                                         | PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 (RENSTRA MURNI TAHUN 2024-2026) | PAGU INDIKATIF RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                        | BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN (BLPU)                                                                              | Rp. 11,114,671,740,-                                      | Rp. 12,017,660,960,-                                      | RP. 13,615,263,762,-                                            |
| 2                        | BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)                                                                                         | RP. 6,915,812,860,-                                       | RP. 8,899,969,800,-                                       | RP. 9.599.969.800,-                                             |
| 3                        | BELANJA HIBAH (HIBAH BANTUAN PARTAI POLITIK, HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN HIBAH FASILITASI LEMBAGA PEMERINTAH) | Rp. 20,500,000,000,-                                      | Rp. 24,000,000,000,-                                      | RP. 23,479,773,200,-                                            |
| <b>TOTAL KESELURUHAN</b> |                                                                                                                       | <b>Rp. 38,530,484,600,-</b>                               | <b>Rp. 44,917,630,760,-</b>                               | <b>RP. 46,615,263,762,-</b>                                     |

Catatan :

Berdasarkan hasil pemetaan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Teknokratik Tahun 2024-2026, Badan Kesbangpol untuk tahun Anggaran 2025 termuat pagu anggaran berjumlah Rp. **38,530,484,600,-** akan tetapi setelah adanya beberapa kegiatan hasil penyesuaian kebijakan, setelah hasil desk rancangan awal pada pagu anggaran berubah menjadi Rp. **44,917,630,760,-**. dan pada rancangan akhir Renja pagu anggaran berubah menjadi **Rp. 46,615,263,762,-** Adapun beberapa hal yang mempengaruhi adanya faktor kenaikan pagu anggaran yang diusulkan oleh Badan Kesbangpol, diantaranya :

- Penyesuaian Pagu Anggaran untuk Hibah Organisasi Kemasyarakatan
- Penyesuaian Bantuan Keuangan Partai Politik (Pagu Anggaran bersifat Proyeksi karena belum adanya data perolehan suara sah pemilu yang menentukan jumlah partai politik yang akan mengisi di pos-pos parlemen dengan besaran perhitungan perolehan surat suara sah untuk Bantuan Parpol di TA. 2025)
- Penyesuaian besaran pagu anggaran untuk memfasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
- Penyesuaian Kegiatan Fasilitasi Paskibraka berdasarkan perubahan nomenklatur sub kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Penyesuaian pagu anggaran untuk memenuhi kebutuhan Sarana Prasarana Pekantoran Perangkat Daerah

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI  
TAHUN 2024

| NO | SASARAN                                                                      |                       |        |       | PROGRAM                                             | KEGIATAN                                                            |                                                                                        |                                  | SUB KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                  | KETERANGAN     |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
|    | URAIAN                                                                       | INDIKATOR             | TARGET |       |                                                     | URAIAN                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                      | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | URAIAN                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                      | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) |                |               |
| 1  | Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi | Nilai AKIP Kesbangpol | Bb     | Nilai | Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                     | 1. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan             | 100%                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                  | 12.232.588.740 |               |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     | 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100%                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                        |                | 17.000.000    |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Keuangan Perangkat Daerah                                                   | 100%                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 1026 Orang/bulan                 |                | 9.098.062.000 |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     |                                                                     |                                                                                        |                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 17 Laporan                       |                | 8.000.000     |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     |                                                                     | 2. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 100%                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                  |                |               |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     | 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   | 100%                             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 2 Paket                          |                | 200.000.000   |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     |                                                                     |                                                                                        |                                  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 8 Orang                          |                | 20.000.000    |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     |                                                                     |                                                                                        |                                  | Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang                                                                                     | 50 Orang                         |                | 264.927.780   |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     |                                                                     | 3. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 100%                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                  |                |               |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     | 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | 100%                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 3 Paket                          |                | 350.000.000   |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     |                                                                     |                                                                                        |                                  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 12 Paket                         |                | 75.000.000    |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     |                                                                     |                                                                                        |                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                           | 2 Dokumen                        |                | 50.000.000    |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     |                                                                     |                                                                                        |                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 12 Laporan                       |                | 422.781.750   |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     |                                                                     |                                                                                        |                                  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                   | 12 Dokumen                       |                | 50.000.000    |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     | 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | 100%                             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                | 34 Unit                          |                | 510.218.250   |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     | 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   | 100%                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 12 Laporan                       |                | 514.598.960   |
|    |                                                                              |                       |        |       |                                                     |                                                                     | 4. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 100%                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                  |                |               |

| NO | SASARAN                                                                                       |                                                      |        | PROGRAM | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KETERANGAN |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|    | URAIAN                                                                                        | INDIKATOR                                            | TARGET |         | URAIAN                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                        | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)                                                                                                                                                                                                                                                    | URAIAN       | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                 | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |
|    |                                                                                               |                                                      |        |         |                                                                                                             | 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                | 100%         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                     | 22 Unit    | 377.000.000   |
|    |                                                                                               |                                                      |        |         |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                         | 25 Unit    | 75.000.000    |
|    |                                                                                               |                                                      |        |         |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                   | 1 Unit     | 200.000.000   |
| 2  | Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi | Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan | 100    | %       | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                |                                                                                                          | Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                                                                   | 100%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 2.290.812.860 |
|    |                                                                                               |                                                      |        |         |                                                                                                             | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                       | 100%         | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                     | 1620 Orang | 2.290.812.860 |
|    |                                                                                               |                                                      |        |         | Program Peningkatann Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |                                                                                                          | Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah                                                                                                                                                                                                                                      | 100%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 3.337.400.000 |
|    |                                                                                               |                                                      |        |         |                                                                                                             | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | 400 Orang    | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah       | 400 Orang  | 845.200.000   |
|    |                                                                                               |                                                      |        |         |                                                                                                             |                                                                                                          | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 12 Laporan   | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 12 Laporan | 537.200.000   |
|    |                                                                                               |                                                      |        |         |                                                                                                             |                                                                                                          | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | 12 Dokumen   | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                           | 12 Dokumen | 1.955.000.000 |
|    |                                                                                               |                                                      |        |         | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                     |                                                                                                          | Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                                        | 100 %        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1.000.000.000 |
|    |                                                                                               |                                                      |        |         |                                                                                                             | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya        | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                       | 1700 Orang   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                    | 1700 Orang | 1.000.000.000 |

| NO | SASARAN |           |        | PROGRAM                                                                                                                                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | KETERANGAN     |
|----|---------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|    | URAIAN  | INDIKATOR | TARGET |                                                                                                                                        | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                         | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                              | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) |                |
|    |         |           |        | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 80.942.031.000 |
|    |         |           |        |                                                                                                                                        | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                          | 12 Dokumen                       | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                       | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun               | 12 Dokumen                       | 79.407.875.000 |
|    |         |           |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                           | 2400 Orang                       | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                  | 2400 Orang                       | 1.500.000.000  |
|    |         |           |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 12 Laporan                       | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 12 Laporan                       | 34.156.000     |
|    |         |           |        | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina                                                                                                                                                                                                                                   | 100%                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 8.595.411.700  |
|    |         |           |        |                                                                                                                                        | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                        | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                | 41 Dokumen                       | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun                                                                                                                     | 41 Dokumen                       | 7.850.411.700  |
|    |         |           |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                    | 300 Orang                        | Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                             | 300 Orang                        | 745.000.000    |

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BEKASI,

NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE  
Pembina Tk. I (IV.b)  
NIP. 19740708 200212 1 007